



MINGGU V AGUSTUS 2023

• TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 •

# infonesia

Harga @ Rp 20.000,-



Road to  
Election  
2024



**RIDWAN KAMIL  
DIPASTIKAN  
PINDAH DARI  
JABAR KE  
JAKARTA**



**ANDRE ROSIADE  
SUDAH PEDE  
SIAP GUSUR  
GUBERNUR  
PETAHANA**



**GAWAT DCS  
SALAH, TANDA  
AWAL PEMILU  
BURUK**

# GANJAR GANDENG CAK IMIN PASTI MENANG!



**NGANTRE  
MENANTANG  
ARINAL  
DJUNAIDI DI  
LAMPUNG**



**RAMAIKAN DCS  
PILEG DPR RI  
CALEG CUKONG  
BEREBUT KUASA**





“Kelompok mana dan partai mana, saya tidak mau menyebutkan itu, karena di situ sudah kelihatan kok, publik juga paham siapa yang menyerang Prabowo”

Ujang Komarudin



## Dinasti Partai di Pemilu 2024

Politik di Indonesia kini tak bisa dijauhkan dari dinasti maupun kekerabatan. Tujuannya jelas, mempertahankan dan mengamankan kedudukan dalam kekuasaan.

Fenomena politik dinasti ini sudah ada di Indonesia sejak masa Orde Baru, bahkan pada masa sebelumnya.

Bagaimana berkuasanya keluarga dan kerabat Presiden Soeharto yang menguasai parlemen melalui Partai Golkar. Keluarga Cendana seakan menjadi simbol dari dinasti politik demokrasi modern Indonesia.

Di masa kini, dinasti politik keluarga kembali dimunculkan sejumlah elit politik, baik yang ada di pusat maupun daerah, dalam upaya mempertahankan kekuasaannya agar semakin kuat.

Tabloid Info Indonesia kali membahas fenomena dinasti politik, salah satunya nampak dari Partai Perindo. Sang Ketua Umum, Hary Tanoesoedibjo, mendaftarkan istri dan anak-anaknya sebagai calon anggota DPR.

Dinasti politik yang dimainkan Hary Tanoë melalui Partai Perindo terasa begitu mencolok di masa sekarang. Dengan kekuatan finansial yang dimilikinya, Hary Tanoë dan keluarganya melenggang ke Senayan dengan mudah.

Hal itu juga menunjukkan sulitnya partai-partai baru dalam melakukan perekrutan caleg, baik di tingkat DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Banyaknya DCS bermasalah dan dinasti politik keluarga yang muncul menunjukkan ada hal tidak beres dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Fenomena dinasti politik juga banyak terjadi di daerah, khususnya mereka yang menjadi kepala daerah. Anak, istri dan keluarga dilibatkan semua untuk bersama mempertahankan kekuasaan selama mungkin.

Pemilu 2024 juga berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar dibanding 2019. Meski istilah Cebong dan Kampret mungkin tidak muncul lagi, namun konflik lewat media sosial dan penyebaran hoaks akan lebih masif hingga memicu adu fisik.

Salah satu upaya untuk mencegah konflik dengan menghentikan upaya pemeriksaan hukum terhadap para peserta Pemilu 2024 agar tidak terjadi upaya politisasi hukum.

Keputusan Kejaksaan Agung tersebut ternyata mendapat respons yang mengejutkan dari peserta Pemilu 2024.

Sementara, di tingkatan elit politik sendiri ternyata dinamiknya berbeda jauh. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni PPP, PAN dan Partai Golkar ternyata dengan mudah pecah karena tidak menemukan solusi yang terbaik.

PAN dan Golkar memilih jalan menuju ke Prabowo Subianto, sementara PPP bergabung dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo.

Di sisi lain, masuknya PAN dan Golkar ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) membuat posisi PKB sedikit terganggu. PKB yang sejak awal bergabung bersama Gerindra seperti tidak dianggap hingga akhirnya mereka membuat keputusan mengejutkan.

PKB bahkan siap berpaling ke PDIP bila syarat yang mereka minta tidak dipenuhi. Hasil kajian survei membuat posisi Ganjar Pranowo menuju angka positif. Hal itu membuat dinamika politik semakin tidak pasti.

Dari daerah, persaingan Pilbug Sumatera Barat juga semakin memanas setelah Ketua DPD Partai Gerindra, Andre Rosiade disebut-sebut sebagai pesaing utama petahana, Mahyeldi Ansharullah.

Ada banyak sajian menarik lainnya yang kami sajikan di Info Indonesia edisi V Agustus 2023 ini. Selamat membaca!!!

## Info indonesia

Kamis, 3 November 2022



INFO PARPOL  
PENENTUAN  
CAWAPRES TUNGGU  
ANGGOTA BARU

INFO OTONOMI  
JALAN PROGRAM  
PENURUNAN  
STUNTING



INFO EKSEKUTIF  
KEPALA DAERAH  
JANGAN BIKIN  
KECEWA

### JOKOWI BERNYALI EVALUASI MENTERI

•Kemungkinan Kecil Berujung Reshuffle

JAKARTA - Menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini disambut pro-kontra. Lebih-lebih, situasi krisis ekonomi tahun depan mengharuskan semua menteri kabinet untuk lebih fokus pada tugas utama di pemerintahan.



### Tiga Pemimpin Negara Belum Pastikan Kehadiran Jokowi: Nanti Saya Telpn Konfirmasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan akan menghadiri tiga pemilihan anggota G20 untuk membuka konferensi tahunan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15-18 November 2023. Namun, tidak diketahui tiga pemimpin negara yang belum memastikan kehadiran mereka.

## Info indonesia

Kamis, 4 Agustus 2022



INFO PARPOL  
KOALISI TERUS  
DIMATANGKAN



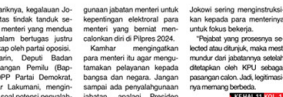
INFO OTONOMI  
KAWASAN  
MANUFAKTUR  
KURANG  
KEMISKINAN



INFO EKSEKUTIF  
LIBATAN PUBLIK  
SUSUN RUKUH

### MENTERI NGELET NYAPRES MUNDUR DARI SEKARANG

JAKARTA - Tidak bisa dituruti, makin hari kian kentara siapa saja menteri yang ngebet mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Presiden Jokowi sendiri sudah menganti-wanti mereka yang tidak fokus bekerja karena konsentrasinya pecah ke urusan pencalonan. Masalahnya, rasa malu dan etika sudah lama rabi dari nurani para pejabat.



### Kebut Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Pemerintah sedang mempersiapkan pengurangan data kemiskinan untuk mendukung pemulihan ekonomi.



### Indonesia Menuju Industri Digital

JAKARTA - Indonesia diproyeksikan menjadi pemain industri digital terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu didukung dengan potensi ekonomi digital yang direncanakan mencapai Rp1.000 triliun.

### Ini Bukan Kriminal Biasa, Ada P...

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi kedatangan Samuel Hutaheant, ayah mendiang Hutaningsih Yusiana Hutaheant alias Brigadir J. Rapike Samuel, melalui media sosial untuk beres. Lantaran kasus yang sedang ditangani Badan Intelijen Nasional (BIN) bersama tim khusus berisikan Kapri ini bukan kriminal biasa.



## Info indonesia

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO  
Sertifikat Dewan Pers  
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzanl Khan PEMIMPIN REDAKSI: Rusdiyono WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani REDAKTUR: Rio Taufiq Adam, Melati Tagore, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina REPORTER: Nefri,

Indra Hadi, Sadam M, Hardi Aar, Beni Martha Daya, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir

EDITOR & GRAFIS : Al Amin, Achilles TATA LETAK : Sujatmiko MEDIA SOSIAL: Haidir Ali KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida SEKRETARIS

REDAKSI: Nur Aisah PENGEMBANGAN BISNIS: RM Solehin, Zul Jamba ADMINISTRASI: Ega Tri Gustina DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

BANK ACCOUNT: \*A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur ALAMAT REDAKSI/IKLAN/

PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 TELP 021-

791 96781 FAX 021-791 96786 PALEMBANG Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Palembang 30126 TELP : 0711-7442344





“Kalau Cak Imin tidak jadi Cawapres, kalau dia nanti tidak jadi untuk diusung menjadi pasangannya Prabowo, dia bisa ngambek, nanti dia bisa afiliasi ke Ganjar”

*Jerry Masie*

# GANJAR GANDENG CAK IMIN PASTI MENANG!

**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejauh ini berikrar untuk terus bersama Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sampai Pemilu 2024. Namun, godaan untuk Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pendamping ganjar Pranowo bisa saja membuat mereka akhirnya berpaling.**

**S**ejauh ini, sejumlah nama erat dikaitkan dengan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, untuk disandingkan pada Pilpres 2024. Mereka di antaranya Erick Thohir, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Khofifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Cak Imin.

Nama Cak Imin mulai muncul ke permukaan sebagai salah satu tokoh yang cocok mendampingi Gubernur Jateng tersebut tak lama usai tersiarnya kabar keduanya melakukan pertemuan secara tertutup di Jakarta, beberapa pekan lalu.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Masie, menilai, posisi Cak Imin bisa beralih untuk masuk menjadi cawapres Ganjar karena sikap PAN dan Partai Golkar yang belum lama ini telah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo.

Menurut pria yang akrab disapa Jerry itu, Cak Imin bisa saja secara senyap melakukan manuver politik lantaran menilai posisinya saat ini terancam gagal menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024.

Terancamnya posisi Cak Imin menjadi cawapres Prabowo lantaran Golkar dan PAN kemungkinan juga menawarkan dua kandidat kepada Gerindra, yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming.

“Jadi gini ya menurut saya, itu kalau Cak Imin tidak jadi Cawapres, saya sudah bilang, kalau dia nanti tidak jadi untuk diusung menjadi pasangannya Prabowo dia bisa ngambek, nanti dia bisa afiliasi ke Ganjar. Nah, jadi yang sekarang itu sebetulnya adalah politik merayu gitu, rayuan politik ya kan, rayuan gombal Cak Imin gitu ya,” kata Jerry saat dihubungi Jumat, 25 Agustus 2023.

Jerry melihat, manuver Cak Imin dengan cara membangun komunikasi ke Ganjar dan Puan merupakan bentuk manifestasi rayuan semata. Harapannya dapat menyentuh hati sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Iya jadi rayuan gombal. Jadi kalau menurut saya, itu sekarang ini masih rayuan gombal Cak Imin untuk bisa merebut hati atau rayuan Cak Imin nantinya bisa jadi meruntuhkan tembok PDIP untuk mendampingi Ganjar di Pilpres,” terang Jerry.

Disisi lain, Jerry melihat, saat ini posisi yang paling kuat untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 adalah Sandi-

aga Uno. Sebab, Sandi adalah sosok pengusaha yang memiliki logistik untuk Pilpres 2024.

Jerry menuturkan, sebelumnya PPP juga telah mewanti-wanti kepada PDIP apabila nanti tidak mengukung Sandiaga Uno menjadi cawapres, maka akan keluar dari koalisi.

“Jadi memang saat ini lagi menarik politik saat ini. Mau siapapun nanti misal Prabowo-Cak Imin, Prabowo-Airlangga, atau nanti Ganjar-Cak Imin, semua itu kalau saya bilang yang akan jadi itu yang mau menanggung logistiknya, jadi itu tergantung logistik,” kata Jerry.

Jerry juga melihat jika Cak Imin nantinya resmi sebagai cawapres Ganjar, maka bukan tidak mungkin sosok Sandiaga Uno dan Erick Thohir akan melakukan manuver lain. Caranya dengan mencoba membangun komunikasi ke bakal capres lain agar dapat diterima mendampingi di Pilpres 2024.

Hal itu lantaran kedua sosok itu juga masuk dalam nominasi cawapres dari calon lain karena sama-sama memiliki amunisi dan logistik yang mumpuni untuk bersaing dalam pesta demokrasi tahun depan.

Kendati demikian, Jerry menyebut, saat ini, pemetaan sosok cawapres pendamping Ganjar ataupun calon lainnya sejatinya masih dalam pemanasan jelang jadwal pentapan kandidat capres yang telah diputuskan oleh KPU.

Menurut Jerry, kondisi saat ini bisa saja memunculkan peta politik baru. Terlebih, koalisi yang saat ini sudah resmi terbangun pun bisa saja melebur atau bubar di pertengahan jalan karena berbeda cara pandang visi dan misi ataupun dalam menentukan cawapresnya.

Jerry menilai, sikap Cak Imin yang diam-diam telah menggelar pertemuan dengan Ganjar dan Puan Maharani beberapa waktu lalu telah menggambarkan isyarat bahwa PKB ditenggarai sedang memulai permainan dua kaki.

Gaya bermain politik dua kali yang bakal dimainkan oleh Cak Imin adalah bentuk jaring pengaman bagi PKB dalam rangka meraup suara di Pemilu 2024.

“Jadi dia akan bermain. Saya lihat PKB memang dari dulu dia bermain safety, dia lihat peluang dan dia akan melihat akan melihat siapa yang berpotensi menang, dia akan ke sana,” lanjut Jerry.

Sementara itu, Pengamat politik dan Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai, Cak Imin kemungkinan bisa saja dipilih mendampingi Ganjar karena PKB memiliki basis suara Nahdidiyin yang dapat mendorong kemenangan pada Pilpres 2024.

Dedi mengatakan, jika PDIP memilih Cak Imin sebagai pendamping Ganjar, maka akan memberikan warna baru di Pilpres 2024.

“Mungkin saja Ganjar-Muhaimin maju melawan Anies dan Prabowo, justru itu peluang bagus. Jadi Muhaimin lebih berpeluang karena porsi di parlemen yang jauh lebih besar,” ucap Dedi.

Dedi mengungkapkan, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi pertimbangan PDIP memilih Cak Imin menjadi pendamping Ganjar. Pertama, PDIP menilai Cak Imin telah memiliki basis masa yang cukup besar, terutama di NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia.

“Pasangan ini akan dianggap saling melengkapi dengan dalih Nasionalis-Religius,” jelas Dedi.

Selain itu, Dedi melihat Ganjar dan PDIP memerlukan partai kelas tengah untuk melengkapi dukungan dari PPP dan Perindo.

Dengan terpilihnya Cak Imin sebagai cawapres dan masuknya PKB ke dalam koalisi, justru akan menambah energi kekuatan baru bagi PDIP guna untuk menghadapi Prabowo dan Anies.

“Jadi dengan tambahan PKB di kubu mereka, maka kekuatan koalisi Gerindra itu tidak lagi mengkhawatirkan. Justru, kontestasi akan berimbang,” ungkap Dedi.

Kendati demikian, menang atau tidaknya sosok Ganjar-Cak Imin dalam Pilpres 2024 tak bisa diprediksi saat ini karena politik selalu bergerak dinamis.

“Yang bisa dipastikan jika koalisi PDIP-PKB terwujud, maka mereka akan mencapai perolehan suara maksimum,” tandas Dedi. ●RDO







# JURUS MENYERANG PRABOWO OBRAL GUGATAN LEWAT MK

**Prabowo Subianto terancam tak bisa berlaga di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kini, setidaknya muncul tiga gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyoal batas usia maksimal calon presiden menjadi 65 atau 70 tahun.**

Munculnya tiga gugatan sekaligus dalam waktu berdekatan diduga diorkestrasi oleh lawan politik Prabowo Subianto. Apabila gugatan tersebut dikabulkan, maka Prabowo yang kini berusia 71 tahun tentu tidak bisa menjadi capres pada Pilpres 2024.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kekuatan politik yang berada di balik gugatan tersebut berupaya membatalkan pencapresan Prabowo karena menyadari elektabilitas Menteri Pertahanan itu tinggi. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia, misalnya, mendapati elektabilitas Prabowo beda tipis dengan capres PDIP Ganjar Pranowo.



Tingkat keterpilihan Prabowo menempati urutan kedua, yakni 29,9 persen. Sedangkan, Ganjar di urutan pertama dengan elektabilitas 32,4 persen. Elektabilitas Ganjar dan Prabowo bisa saja sama karena selisihnya masih dalam rentang margin of error 2,35 persen.

Ujang mengatakan, kekuatan politik yang mendalangi tiga gugatan tersebut adalah lawan politik Prabowo di Pilpres 2024, khususnya yang kerap menyerang dan mengkritik Ketua Umum Partai Gerindra itu akhir-akhir ini. Meski mengklaim tahu siapa dalangnya, Ujang enggan menyebutkan nama.

“Kelompok mana dan partai mana, saya tidak mau menyebutkan itu, karena di situ sudah kelihatan kok, publik juga paham siapa yang menyerang Prabowo,” kata Ujang,

Selasa, 22 Agustus 2023.

Analisis politik Citra Institute, Efriza, mengatakan, gugatan yang diajukan akan sangat sulit dikabulkan oleh MK. Sebab, aturan tersebut menyangkut dengan lembaga hukum, bukan ranah konstitusi.

“Jelas saja gugatan ini disinyalir sulit untuk diterima, karena itu urusan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang merupakan produk Pemerintah dan DPR, bukanlah MK,” kata Efriza kepada Info Indonesia.

Dia mengatakan, MK tidak mengurus urusan hukum yang terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Sebaiknya, kata dia, para pemohon membuka ruang diskusi bersama DPR dan Pemerintah.

“Ini bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Putusan melengkapi persyaratan-persyaratan itu, semestinya dikembalikan kepada pembentuk undang-undang yakni DPR dan pemerintah, bukan MK,” jelas Efriza.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo itu menyakini, lembaga pimpinan Anwar Usman itu tidak akan mengabulkan gugatan tersebut. Kata Efriza, gugatan tersebut bermuatan politis.

“MK tidak ingin sebagai pengawal konstitusi bersifat tidak independen, MK diya-

yang berwenang untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran HAM di masa lalu.

“Semestinya sasarannya adalah Komnas HAM, mereka semestinya yang diminta melengkapi hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat penyalakan terhadap aktivis,” jelas Efriza.

Dia menilai, gugatan tersebut sepertinya hanya kepentingan politik. Gugatan itu mengarah ke calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Sasarannya hanya kepada capres Prabowo Subianto, lembar ini terbuka kembali setiap Pilpres berlangsung,” ucap Efriza.

Namun, Efriza menyayangkan urusan pelanggaran HAM dicoba dibuat rekayasa melalui penafsiran MK agar memasukkan usulan tersebut. Padahal, kasus Pelanggaran HAM merupakan domain hukum, harus dibuktikan berdasarkan fakta dan bukti yuridis yang kuat.

“Jadi andai disetujui oleh MK penambahan pasal itu, jelas juga perlu pembuktian secara hukum,” jelas Efriza.

Dia mengatakan jangan sampai persoalan pelanggaran HAM sekadar untuk kepentingan politik. Meskipun isu pelanggaran HAM ini pastinya akan memberikan citra yang negatif terhadap Prabowo Subianto.

anggaran HAM ini dimainkan, tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo Subianto.

Kata Efriza, faktanya suara masyarakat tetap menempatkan Prabowo Subianto dengan elektabilitas tinggi. Selain itu, suara Prabowo Subianto di Pilpres 2019 bersaing sangat ketat dengan Jokowi kala itu.

“Ini membuktikan masyarakat tidak terpengaruh secara keseluruhan,” ujar Efriza.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, mengatakan, menjadi hal yang sangat wajar bila isu ini kembali mencuat kala Prabowo Subianto maju lagi dalam Pilpres 2024.

“Ini menjadi hal yang wajar narasi Pelanggaran HAM kembali digemakan ke masyarakat,” kata Iwan.

Apalagi, kata dia, Prabowo Subianto memiliki kans yang sangat besar untuk memenangkan Pilpres 2024. Prabowo Subianto saat ini sudah mendapatkan banyak dukungan dari partai politik.

“Dengan majunya kembali Prabowo sebagai capres 2024 dan merupakan salah satu kandidat yang memiliki peluang besar dalam memenangkan Pilpres,” terang Iwan.

Dia berpendapat, di setiap kontestasi, pelanggaran HAM akan menjadi isu yang sangat seksi itu dibahas dan diangkat ke publik. Dia menyatakan, isu pelanggaran HAM ini pastinya akan memberikan citra yang negatif terhadap Prabowo Subianto.

“Karena narasi isu pelanggaran HAM merupakan narasi yang seksi untuk bisa menciptakan persepsi negatif publik kepada Prabowo. Dengan persepsi negatif mengenai pelaku pelanggaran HAM 1998 yang pelan-pelan terbangun ini bisa mereduksi elektabilitas Prabowo menjelang Pilpres mendatang,” imbuh Iwan.

Maka dari itu, dia meyakini bahwa gugatan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pencapresan Prabowo Subianto. Sebab, pada saat Prabowo maju sebagai calon presiden, isu HAM itu tidak membuat Prabowo gagal maju di Pilpres.

“Mungkin agak berat untuk menghentikan langkah Prabowo maju dalam bursa calon presiden mendatang,” ujarnya.

Dia mengatakan, terkait dengan persoalan ini, belum ada keterangan resmi dari pihak manapun yang membuktikan bahwa Prabowo Subianto itu melakukan pelanggaran HAM berat.

“Karena selama ini belum ada keputusan hukum apapun yang menyatakan Prabowo sebagai pelanggar HAM 1998 atas penyalakan para aktivis 98,” terang Iwan.

Oleh karena itu, dukungan yang diberikan oleh mantan tokoh sentral aktivis 1998 yang juga politisi PDIP, Budi-man Sudjatmiko, akan mengubur dalam-dalam persepsi bahwa Prabowo Subianto itu terlibat dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu. •RDO







“Jadi, peluang Anies bisa maju tergantung sikap Nasdem. Kalau Nasdem tetap cawe-cawe dan memaksakan cawapres dari pilihannya, maka terbuka peluang KPP akan pecah”

Jamiluddin Ritonga

# AMAN DARI KASUS HUKUM PELUANG ANIES TERHALANG PARTAI

**Angin segar seolah menghampiri Anies Baswedan yang diusung sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan instruksi kepada jajarannya agar menunda pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyangkut calon presiden maupun calon wakil presiden.**

Surat instruksi yang dikeluarkan Jaksa Agung tersebut turut mengemukakan alasan mengapa proses penyelidikan hingga penyidikan kasus dugaan korupsi yang memuat nama capres-cawapres yang maju di pesta demokrasi 2024, yaitu agar menghindari merebaknya kampanye hitam (black campaign) oleh oknum-oknum tertentu.

Sementara, Anies belakangan diisukan ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek penyelenggaraan Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isu ini menguat ketika lembaga antirasuah menerima laporan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai “Kelompok Forum Masyarakat untuk Keadilan”.

Keterlibatan Anies dalam kasus dugaan korupsi itu, disampaikan oleh kelompok tersebut karena sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tidak menepati komitmen pembayaran penyelenggaraan Formula E yang dilakukan di tengah-tengah pandemi Covid-19, atau tepatnya pada 4 Juni 2022, Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Meski begitu, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, berpendapat, isu kasus hukum yang menjerat nama

Anies itu tak akan signifikan mempengaruhi pencapresan dia. Karena, instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin paling tidak mampu mempengaruhi kerja KPK dalam pengusutan kasus Formula E.

“Instruksi itu setidaknya dapat meminimalisir terjadinya politisasi hukum terhadap capres dan cawapres yang akan berlaga pada Pilpres 2024. Tertutup peluang bagi aparat hukum untuk cawe-cawe masalah politik ke ranah hukum,” ujar Jamiluddin kepada Info Indonesia, Kamis, 24 Agustus 2023.

Bahkan, Jamiluddin memandang intruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Jamintel dan Jampidsus untuk tidak memeriksa kasus dugaan korupsi capres dan cawapres tentu layak diapresiasi, mengingat tujuannya adalah untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu 2024 agar tidak terjadi polarisasi yang mengemuka ketika dan pasca Pilpres 2019.

“Hal itu tentunya melegakan bagi semua capres dan cawapres yang akan maju pada Pilpres 2024. Mereka dapat fokus untuk berkontestasi, khususnya memenangkan Pilpres dengan situasi damai,” tutur dia.

Di samping faktor instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jamiluddin juga memandang peluang KPK menjerat Anies Baswedan sangat kecil. Karena, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu telah diperiksa dan membantah mengambil untung dari penyelenggaraan Formula E yang memakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga hampir Rp1 triliun.

“Bahkan, tuduhan terhadapnya terkait Formula E dinilai banyak pakar hukum sangat tidak mendasar. Karena itu, ada tidaknya intruksi Jaksa Agung tersebut, tampaknya tidak akan menjadi perintang bagi Anies untuk menjadi capres. Sebab, Anies dinilai bersih dari kasus tersebut,” sambungnya berpendapat.

Justru, Jamiluddin memandang kendala Anies maju di Pilpres 2024 bukan berasal dari isu hukum yang mengemuka. Tetapi, karena unsur dinamika politik yang terjadi di dalam KPP yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai

Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Masalah pencapresan Anies justru datang dari internal koalisi KPP. Ada indikasi, Anies masih terbelenggu oleh Parpol pengusungnya dalam menentukan cawapresnya. Padahal, Anies secara tersurat sudah diberi mandat untuk memilih cawapresnya berdasarkan kriteria yang disepakati. Namun, mandat tersebut tampaknya tak diberikan sepenuhnya,” katanya memperkirakan.

Dari pengamatan dinamika yang terjadi di internal KPP, Jamiluddin yang pernah menjabat dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) Jakarta itu menduga, Anies tengah berada dalam kontrol Partai Nasdem, mengingat dirinya merupakan salah satu yang berperan dalam pendirian partai berlambang burung elang itu.

“Hal itu terlihat dari belumnya Anies mengumumkan cawapresnya. Padahal, Anies mengakui sudah memiliki nama cawapres di kantongnya,” ucapnya mengungkit.

Di samping itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga dinilai sedang bermanuver memegang kendali KPP lewat penentuan cawapres Anies. Sebab menurut Jamiluddin, pemilik perusahaan media tersebut terus menyodorkan nama-nama tokoh potensial melalui mulut jajarannya di dewan pimpinan pusat (DPP) partai.

“Nasdem masih terus menambah bakal Cawapres Anies. Salah satunya Yenny Wahid. Ini artinya, Nasdem terkesan mentahkan nama cawapres yang sudah di kantong Anies. Hal itu juga menjadi indikasi, Nasdem tidak memberi mandat

sepenuhnya kepada Anies dalam menentukan cawapres. Nasdem tampaknya tetap cawe-cawe dalam menentukan cawapres Anies,” katanya menganalisa.

Dari fakta yang terjadi tersebut, pada akhirnya Jamiluddin juga memperkirakan cawapres Nasdem menentukan cawapres Anies itu dapat membuat KPP tak lagi solid menghadapi Pilpres 2024 yang diperkirakan akan diikuti tiga pasangan calon. Sebab, PKS dan Demokrat sebagai anggota KPP merasa dikhianati karena tak kunjung diumumkan nama cawapres yang sudah berada di kantong Anies.

“Bisa saja PKS dan Demokrat tidak sabar atas cawe-cawe Nasdem. Apalagi PKS dan Demokrat sudah mendesak Anies untuk segera mengumumkan cawapresnya, sementara Nasdem justru menyatakan sebaliknya. Hal ini tentunya berpeluang menimbulkan gesekan di internal KPP,” tuturnya.

Maka dari itu, Jamiluddin menyimpulkan peluang Anies maju Pilpres 2024 bukan terhalang karena menyeruaknya kasus hukum Formula E yang ditangani KPK. Tetapi, lebih kepada masalah internal koalisi yang pengusungnya semakin menguat jelang 6 bulan hari H pencoblosan.

“Jadi, peluang Anies bisa maju tergantung sikap Nasdem. Kalau Nasdem tetap cawe-cawe dan memaksakan cawapres dari pilihannya, maka terbuka peluang KPP akan pecah. Kalau hal itu terjadi, maka peluang Anies menjadi capres akan tertutup. Anies berpeluang gagal maju karena tidak solidnya KPP, khususnya Nasdem yang memaksakan kehendaknya,” tutup Jamiluddin. RDO





“Ini tren yang hampir terjadi pada setiap Parpol yang ada di kita sekarang ini. Menguatnya dinasti politik kekerabatan, dan ini semua bisa dijelaskan karena oligarki partai yang belum juga berubah”

Lucius Karus



# RAMAIKAN DCS PILEG DPR RI CALEG CUKONG BEREPUT KUASA

**Kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tingkat pusat atau DPR RI sudah mulai terasa keriuhanannya. Paling tidak pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Jum'at, 18 Agustus 2023.**

Sebabnya, satu hari setelah penetapan tersebut, publik bisa melihat nama-nama bakal caleg yang kesemuanya berpotensi mengikuti laga dengan menggunakan bendera 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

Dalam portal resmi KPU terkait DCS DPR RI, terdapat 9.919 bakal caleg yang memenuhi syarat administratif berdasarkan ketentuan di UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) 10/2023 tentang Pencalonan Anggota Legislatif (Pencaleg), sehingga bisa dimasukkan ke dalam DCS Pileg 2024 oleh KPU.

Menariknya, dari total bakal caleg yang lolos tersebut, termuat nama-nama yang menarik perhatian publik. Karena mereka terbilang sebagai pendatang baru di dunia politik, atau bahkan bukan berlatar belakang politik yang biasa tampil di layar kaca.

Jika diamati secara seksama, publik bisa mengkategorikan nama-nama bakal caleg yang masuk DCS ke dalam beberapa klaster, seperti politisi petahana atau yang masih menjabat sebagai anggota DPR RI; pendatang baru; pengusaha; artis; hingga warga negara asing (WNA) yang pindah kependudukan.

Manajer Riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, salah satu yang turut mencermati nama-nama bakal caleg yang masuk DCS. Namun, dia menyoroti banyaknya nama pendatang baru yang memiliki hubungan kekerabatan dengan politisi kenamaan nasional, serta beberapa yang berlatar belakang pengusaha ikut “nyalon legislatif” di Pemilu Serentak 2024.

“Saya kira daftar caleg yang berisi nama pengusaha maupun dinasti merupakan fenomena rutin setiap kali Pemilu Legislatif,” ujar Lucius saat diwawancarai Info Indonesia di Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.

Berdasarkan penelusurannya, Lucius mendapati nama Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, didaftarkan sebagai bakal caleg bersama dengan istrinya, Liliyana Tanaja Tanoesoedibjo, dan juga seluruh putra/putrinya yang berjumlah lima orang, di daerah pemilihan yang berbeda dari total 84 Dapil yang ada di Pileg 2024.

Hary Tanoesoedibjo tercatat sebagai bakal caleg yang akan berlaga di Dapil Banten III dengan berbekal nomor urut 1. Sementara istrinya, Liliyana Tanoesoedibjo, terdaftar sebagai bakal caleg di Dapil Jakarta II nomor urut 1.

Anak pertama Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, terdaftar sebagai bakal caleg Perindo Dapil Jawa Timur I dengan nomor urut 1. Adapun adiknya atau anak kedua Hary Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo, terdaftar sebagai bakal caleg Perindo Dapil Jakarta III nomor urut 1.

Sementara anak ketiganya, Jessica Tanoesoedibjo terdaftar bakal caleg Partai Perindo Dapil NTT II, dengan nomor urut 1. Kemudian, anak keempatnya, Clarissa Tanoesoedibjo, didaftarkan sebagai caleg Perindo Dapil Jawa Barat I nomor urut 2. Anak bungsunya, Warren Tanoesoedibjo, maju Dapil Jawa Tengah I nomor urut 2.

Fenomena satu keluarga Nyaleg tersebut, menurut Lucius bukan sesuatu hal yang mengagetkan. Sebab baginya, tren politik sekarang ini banyak politisi yang sudah punya nama atau bahkan pemodal menginginkan tampuk kekuasaan ada di genggamannya, sehingga membuat dinasti politik adalah keharusan.

“Ini tren yang hampir terjadi pada setiap Parpol yang ada di kita sekarang ini. Menguatnya dinasti politik kekerabatan, dan ini semua bisa dijelaskan karena oligarki partai yang belum juga berubah. Jadi saya kira, ini fenomena yang hampir selalu terjadi setiap Pemilu, selalu dibahas. Tetapi, rekomendasi untuk memastikan itu tidak terjadi, itu

tidak pernah juga dilakukan misalnya oleh pembuat UU,” tuturnya.

Selain nama keluarga Hary Tanoesoedibjo yang dikenal sebagai pengusaha media hingga perbankan, terdapat nama pemodal besar yang mendapat posisi strategis dari Parpol karena mendapat nomor urut 1. Sementara, sosok politisi yang punya hubungan kekerabatan dengan elite Parpol hanya mendapat nomor urut 2.

Lucius menyebutkan contoh konkret dari fenomena tersebut, yakni terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), khususnya di Dapil Jawa Timur (Jatim) VIII. Pasalnya, di wilayah tersebut terdapat nama kakak Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yakni Abdul Halim Iskandar, yang kalah nomor urut dengan pengusaha maskapai penerbangan ternama, Rusdi Kirana.

Uniknya, Halim yang notabene punya hubungan darah dengan Cak Imin justru hanya mendapat nomor urut 2. Sedangkan, Rusdi Kirana mendapat nomor urut 1. Hal ini yang menurut Lucius menjadi satu fenomena yang di luar nalar, karena kaum pemodal bisa mengalahkan hubungan kekerabatan elite partai.

“Yang mungkin berbeda, sekarang ini adalah Parpol semakin nekat untuk mendaftarkan nama cukongnya langsung. Cukong umumnya sih tak mau terjun langsung ke arena politik praktis. Umumnya mereka membayar orang lain sebagai kaki tangan. Bagi cukong kepentingan bisnis membuatnya perlu punya pasukan di arena politik praktis demi mengawal bisnis-

nya. Apalagi cukong hitam. Dia akan memilih menjadi pemain belakang layar dengan membentuk pasukan politisi,” urainya.

Yang paling mengagetkan Lucius, dalam DCS Pileg DPR RI 2024 juga termuat nama yang agak asing di telinga orang Indonesia. Itu dia temukan saat menelusuri Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri yang juga dikategorikan sebagai salah satu “Dapil Neraka”.

Nama yang dimaksud ialah Chong Sung Kim, yang terdaftar sebagai bakal caleg yang bernaung di Partai Golkar, dan dibekali nomor urut 7 oleh partai beringin.

Setelah melakukan penelusuran latar belakang Chong Sung Kim dari berbagai sumber, ternyata dia mantan warga negara Korea yang pindah kependudukan menjadi WNI. Sejak tinggal di Tanah Air, Chong Sung Kim aktif sebagai advokat, dan mendirikan Indoyang & Partners Law Firm.

Bahkan, karena usahanya mengadvokasi, Chong Sung Kim terpilih menjadi Ketua Umum Gerakan Advokasi dan Hukum (Gakum) Kosgoro 1957, dalam Musyawarah Besar (Mubes) Gakum Kosgoro, di Hotel Merlynn Park, Gambir, Jakarta Pusat, 1 April 2023.

Pada Pileg 2024, Chong Sung Kim akan berhadapan dengan sejumlah bakal caleg yang namanya sudah populer seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ida Fauziyah, yang maju dari PKB dengan nomor urut 1, hingga Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule, yang maju dari Partai Gerindra dengan nomor urut 2.

Selain itu, juga terdapat pesohor di dunia tarik suara yakni Elfonda Mekel alias Once, mantan vokalis grup band Dewa 19, yang maju dari PDIP dan mendapat nomor urut 2.

Ditambah, ada nama elite PDIP seperti Masinton Pasaribu yang kini telah duduk di DPR RI serta Eriko Sotarduga. Kemudian ada Prasetyo Edi Marsudi yang kini masih menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

Dari Golkar, Chong Sung Kim mesti berebut suara di Dapil DKI Jakarta II dengan petahana seperti Christina Aryani. Adapun nama elite politik lain yang maju dari Dapil itu adalah mantan Ketua MPR yang juga politisi senior PKS, Hidayat Nur Wahid.

Melihat fenomena itu, Lucius berkesimpulan ada yang salah dari Pencaleg tahun 2024. Sebab, nama-nama bakal caleg yang dimajukan Parpol hanya bermodal uang, kekerabatan, atau bahkan berasal dari mantan warga negara asing yang belum dikenal publik.

“Ini melawan demokrasi yang menginginkan penyebaran kekuasaan, pembagian kekuasaan, distribusi kuasa kepada rakyat,” tutup Lucius. •RDO







“Untuk menggeser petahana tidaklah sulit, apalagi caleg perempuan yang sudah dikenal masyarakat. Mereka berpeluang besar, seperti anak Gubernur Sumsel Herman Deru”

Arianto

# CALEG PEREMPUAN SUMSEL POTENSI MENANGNYA BESAR

**Keikutsertaan perempuan sebagai calon anggota legislatif, baik DPR RI maupun DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, memberikan warna tersendiri dalam dunia politik di Tanah Air, khususnya di Sumatera Selatan.**

**S**alah satu Perempuan yang akan bertarung sebagai caleg di DPRD Sumsel adalah kader Partai Bulan Bintang (PBB), Fitriana. Perempuan yang akrab disapa Pingky ini akan maju sebagai bakal caleg DPRD Sumsel dari Dapil I yang meliputi Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Gandus, Kertapati, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Jakabaring, dan Plaju.

Sebagai salah seorang bakal caleg perempuan, Fitriana mengungkapkan, kehadirannya menjadi bukti jika perempuan juga bisa ikut terlibat aktif dalam panggung politik. Hal itu diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang positif bagi masyarakat, khususnya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Sumsel.

“Saya ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa memberikan sumbangsih dan kontribusi untuk kemajuan daerah dan masyarakat. Saya akan memperjuangkan hak perempuan karena angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi, miris memang,” ungkapnya.

Selain memperjuangkan aspirasi dan hak-hak kaum perempuan, Pingky juga akan memberikan perhatian khusus terhadap pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumsel.

Dalam dunia usaha, ia merupakan pelaku aktif yang sudah menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Latar belakang perempuan yang dikenal sangat bersahaja ini merupakan seorang desainer dan entertain. Dia juga merupakan pemilik Butik Pingky QQQ serta Direktris dari CV Finksuca sekaligus Ketua Koperasi Mandiri FSQ.

“Potensi kita cukup memadai, hanya perlu ruang, semoga nanti saya bisa memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, khususnya untuk kaum perempuan,” ungkapnya.

Selain kesibukannya sebagai pengusaha, dia juga masih menjalani kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Hal itu membuatnya banyak mendengar dan mengetahui kebutuhan, keluhan serta aspirasi dari kalangan perempuan. Ia juga melihat selama ini Masyarakat, khususnya perempuan, enggan untuk menyalurkan aspirasinya.

Dia berharap kehadirannya di Pi-

leg 2024 mampu mengakomodir hal tersebut, sehingga hak-hak perempuan di Kota Palembang akan mereka dapatkan.

“Selama ini perempuan jarang ada yang berani bersuara, mungkin dengan kehadiran saya mereka bisa lebih berani lagi. Karena sesama perempuan biasanya ikatan emosionalnya lebih kuat, sehingga mampu mendengar keluhan dan mengakomodir apa yang menjadi harapan kaum perempuan di Sumsel,” jelasnya.

Pingky optimis bisa meraih suara terbanyak pada Pileg mendatang, terutama di Dapil I, karena banyak dukungan dari masyarakat Sumsel.

Pada pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, dia mendapatkan di nomor urut 1.

Putri pasangan Inter Mansyur dan Mariam yang merupakan seorang pejuang ini mantap maju untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat karena dunia perpolitikan bukan hal baru baginya.

“Papa saya adalah Polri, sedangkan ibu saya dari TNI. Keduanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, sebelum pensiun ayah saya bertugas di Polda Sumsel. Di zaman Presiden Soeharto, papa saya ditunjuk langsung, karena dari Partai Golkar dan mendapatkan penghargaan dan dijadikan Ketua Dewan di Kabupaten Muara Enim dari Fraksi ABRI. Jadi untuk dunia perpolitikan bukan hal baru bagi saya,” katanya.

Dia mengungkapkan, di Dapil Sumsel I, ada 6 orang kandidat bakal caleg dari PBB, di mana tiga di antaranya dari kaum perempuan, termasuk dirinya. Sedangkan sisanya adalah laki-laki.

“Intinya saya telah mempersiapkan strategi khusus guna memperoleh suara terbanyak, sehingga dapat pat

duduk sebagai anggota DPRD Sumsel mendatang,” ungkapnya.

Pingky saat ini juga tercatat sebagai Bendahara Umum DPP Pro Prabowo Subianto (Propas) wilayah Sumsel untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Saya bergabung di relawan Propas karena PBB sendiri merupakan salah satu partai pendukung agar Prabowo di Pemilu 2024 bisa menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029,” katanya.

Dia juga aktif di dunia organisasi. Hal itu terbukti dengan dirinya menduduki posisi sebagai Wakil Sekretaris di Pemuda Panca Marga (PPM) yang merupakan wadah dari putra-putri pejuang.

## Lanjutkan Perjuangan Kakak

Selain Fitriana, ada pula putri Gubernur Sumsel Herman Deru, yakni Samantha Tivani, yang mencalonkan diri jadi bacaleg DPR RI dari Dapil 2 melalui Partai Nasdem.

Samantha Tivani akan melanjutkan cita-cita kakaknya, mendiang Percha Leanpuri yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Percha Leanpuri yang meninggal dunia pada 2021, menjadi inspirasi Samantha untuk melanjutkan berkarir sebagai wakil rakyat di tingkat nasional.

“Seperti kakak saya, putri daerah asal OKU Raya, masyarakat bisa menyampaikannya dan

langsung dibantu oleh kakak saya. Walau tiga tahun menjabat, tapi kakak saya langsung cepat tanggap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sebagai perwakilan perempuan, dia berharap kehadirannya bisa menggairahkan semangat kaum hawa di Bumi Sriwijaya untuk menyampaikan pendapat dan opininya. Apalagi dia juga mewakili generasi muda yang bisa membawa warna baru di Senayan.

Lewat kursi di Senayan inilah, Samantha Tivani akan membuktikan jika perempuan tidak kalah dengan laki-laki, terutama dalam berpolitik.

“Kalau diridhoi Allah SWT untuk duduk di DPR RI, saya akan melanjutkan langkah dan cita-cita dari almarhumah Percha. Saya tidak mau mengandai-andai soal persaingan dengan petahana. Kita memiliki trik dan langkah sendiri,” ujarnya.

Dia juga berharap agar para perempuan di Sumsel jangan sampai takut untuk berkreasi dan jangan mudah menyerah karena persaingan antar gender. Menurutnya, perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk berpendapat dan berpolitik.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI), Arianto, menilai jika semua gender mempunyai kesempatan besar dalam memenangkan Pileg 2024.

Dia menyebut, Samantha Tivani sudah membaur ke masyarakat jauh sebelum persaingan di Pileg 2024 dimulai. Dengan embel-embel nama besar ayahnya sebagai Gubernur Sumsel, maka semakin mempermudah langkah Samantha Tivani untuk lolos ke Senayan.

“Untuk menggeser petahana tidaklah sulit, apalagi caleg perempuan yang sudah dikenal masyarakat. Mereka berpeluang besar, seperti anak Gubernur Sumsel Herman Deru,” katanya. ●RDR





"Kami dari Propas optimistis Prabowo presiden terpilih di Pilpres 2024, bahkan menargetkan kemenangan di Sumsel 75 persen"

Karyono



# SIAPKAN DUA STRATEGI MENANGKAN PRABOWO

**Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) kini bergabung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.**

U sai deklarasi resmi, para pendukungnya juga sudah menyiapkan strategi agar jagoan mereka menang di daerah. Relawan Pro Prabowo Subianto (Propas) Sumatera Selatan, Karyono, optimistis Ketua Umum Partai Gerindra itu akan memenangkan 75 persen suara di Sumsel pada Pilpres 2024.

Propas Sumsel merasa di atas angin karena melihat koalisi Prabowo yang gemuk di Pilpres 2024 setelah bergabungnya Partai Golkar dan PAN dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara, dukungan juga datang dari parpol non parlemen, di antaranya Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora.

"Kami dari Propas optimistis Prabowo presiden terpilih di Pilpres 2024, bahkan menargetkan kemenangan di Sumsel 75 persen," kata dia.

Karyono membocorkan ke depannya mereka sudah mempersiapkan trik dan strategi untuk kemenangan Prabowo di Sumsel. Strategi pertama Propas bersama para partai koalisi akan menggelar deklarasi yang sekarang masih akan dijadwalkan.

"Tujuannya untuk menyatukan visi dan misi bersama. Karena semua partai tentunya memiliki tujuan berbeda. Namun itu tidak masalah, terpenting kita mempunyai misi dan visi satu, memenangkan Prabowo," tegasnya.

Strategi kedua dengan melakukan Roadshow ke 17 kabupaten/kota di Sumsel. Agenda itu murni dilakukan oleh Propas secara individu tanpa melibatkan koalisi.

"Kami bukan kampanye yah. Itu untuk memberikan sosialisasi saja. Karena tahapan kampanye belum ada agar tidak salah sangka. Kami juga akan berjumpa dengan rekan-rekan Propas di seluruh Sumsel," terangnya.

Sementara itu, DPD Partai Golkar Sumatera Selatan mendukung penuh keputusan DPP yang telah menetapkan Prabowo sebagai capres. "Sesuai arahan, kami akan mendukung Pak Prabowo di Sumsel," kata Ketua Pemenangan Pemilu Sumsel 2, Hilmin.

Dikatakan Hilmin, Partai Golkar menentukan dukungan kepada Prabowo Subianto karena adanya empat faktor fundamental. Pertama faktor historis karena Prabowo dulunya adalah kader Partai Golkar.

"Ikatan ini sangat kuat dengan keluarga besar pohon beringin, tahun 2019 lalu Partai Golkar andil

besar memenangkan meskipun belum terpilih," ujarnya.

Kedua, faktor ideologis. Prabowo dan Partai Gerindra memiliki kesamaan dengan ideologi Partai Golkar sebagai partai tengah yang bisa mengakomodir lintas agama, suku, ras, lintas profesi dan dapat diterima seluruh kalangan, baik pemilih tua maupun pemilih milenial.

Ketiga, faktor visi kebangsaan. Partai Golkar dan Prabowo memiliki visi kebangsaan untuk melanjutkan arah pembangunan Indonesia ke depan yang lebih baik.

"Lalu, keempat, sosok Prabowo sebagai pemersatu antar anak bangsa. Kondisi saat ini menurut kami hanya Prabowo yang bisa mempererat antara kelompok kiri dan kanan ini terlihat dari sosok kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan," paparnya.

Menurutnya, Partai Golkar akan memenangkan Prabowo di seluruh Dapil Sumsel. Terutama dengan dukungan kekuatan penuh mesin politiknya di seluruh tingkatan dan lapisan.

"Merujuk dari perolehan Pilpres 2019 sebenarnya cukup merata, kami secara struktur Partai Golkar sangat siap dan solid serta optimis Prabowo akan menang di Sumsel dengan pendekatan skema kolaborasi dan sinkronisasi Pileg DPR, DPRD," ujarnya.

Dukungan serupa juga dilakukan oleh DPW PAN Sumsel yang mendukung penuh keputusan DPP dengan telah menetapkan Prabowo sebagai capres.

"Kami mendukung penuh dan tegak lurus apa yang diputuskan DPP," kata Sekretaris DPW PAN Sumsel, Joncik Muhammad.

Joncik menegaskan akan menggerakkan kekuatan dan mesin partai

untuk memenangkan Prabowo di Sumsel.

"Sumsel salah satu lumbung suara Prabowo, Insya Allah Prabowo akan kembali menang di Sumsel bersama dengan partai koalisi akan bergerak," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Andries Lionardo, mengatakan, persaingan di Pilpres 2024 diprediksi cukup ketat. Dari tiga nama yang beredar masih berpotensi berubah karena dinamika politik yang begitu besar, khususnya di kalangan elit partai.

Berbagai komunikasi politik masih terus berjalan dan dilakukan partai untuk mencari siapa yang akan mereka dukung. Besarnya dinamika politik ini kemungkinan akan mengerucut menjadi dua pasangan saja.

"Sejauh ini dinamika politik yang terjadi sangat besar. Memang saat ini masih ada tiga calon, tapi kalau saya melihat akan berakhir di dua calon saja. Kita tahu komunikasi politik terus dilakukan, sehingga apa yang terjadi hari ini bisa saja berubah," terang Andries.

Dosen FISIP Unsri ini menilai, komunikasi politik yang dilakukan membuat situasi juga ikut berbeda dan berubah. Bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke Prabowo Subianto secara langsung mempengaruhi kekuatan Partai Gerindra dan PKB yang sebelumnya telah berkoalisi.

Sementara, PDIP dan Nasdem juga cukup intens membuka komunikasi untuk mendapatkan kekuatan baru.

"Sehingga bisa saja terjadi duet Ganjar-Anies yang akan bersaing dengan Prabowo. Kalau sudah begitu, maka akan terjadi satu putaran karena diikuti dua calon," ungkapnya.

Peluang terjadi dua pasangan capres ini sangat besar bila melihat dinamika politik yang terjadi. Suara Anies yang masih berada di kisaran 20 persen bisa membantu Ganjar untuk meraih kemenangan atas Prabowo.

Selain itu, dengan adanya dua pasangan, maka Pilpres 2024 akan dilakukan satu putaran dan hal tersebut sangat menghemat anggaran. Kemudian dinamika politik juga kemungkinan akan lebih kondusif. RDR







“Konflik politik uang ini hingga sekarang tidak bisa diberangus dan melibatkan banyak orang. Hal ini juga bisa menjadi pemicu terjadi konflik fisik yang melibatkan banyak orang”

Ardiyan Saptawan

# POTENSI KONFLIK DI DAERAH LEBIH BESAR

**Informasi yang bebas tanpa ada tanggung jawab membuat perbedaan di masyarakat semakin besar. Imbasnya akan timbul berbagai konflik di masyarakat, khususnya di masa pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).**

Pengamat Hukum dan Politik dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Sri Sulastri, mengatakan, potensi konflik yang terjadi di Pemilu 2024, khususnya saat Pilpres, adalah ramainya saling hujat di media sosial hingga mengakibatkan bentrokan fisik.

Saling hujat di medsos adalah bola panas yang terus menggelinding membakar perjalanan pesta demokrasi dan setiap hari terus terbakar. Belum lagi partai politik terus kencang memanaskan mesin politik menggelar deklarasi dan mencari dukungan.

“Pilpres 2024 sangat berpotensi konflik. Secara yuridis formal Pilpres belum terjadi, tetapi saling hujat sudah mulai terdengar di medsos,” kata dia.

Dia mengakui, panasnya tensi politik dengan cara saling hujat di medsos itu sangat berbahaya karena dampaknya potensi konflik saling serang.

“Celaknya lagi, tidak hanya saling serang di medsos, para pendukung bisa sampai tawuran. Pendukung yang sudah terpancing di medsos bisa bertemu di dunia nyata. Setelah berdebat sama-sama bertemu untuk diselesaikan. Saya khawatir kedua pendukung berkelahi, bisa juga mereka tawuran dengan jumlah besar antara para pendukung,” terangnya.

Sri Sulastri menyebutkan, beda pilihan merupakan hal wajar dan sah berdasarkan aturan. Jadi tidak bisa pendukung dari golongan partai, relawan, simpatisan hingga ke akar rumput memaksakan kehendak sampai menjadi konflik. Terlebih lagi sama-sama menjelek-jelekan calon yang mereka dukung.

“Ada tahun lalu kasus para pendukung berbeda itu saling hujat, lalu bertemu dan saling tembak. Hal itu semua ulah dari perdebatan yang panas di medsos. Sekarang semua itu sudah kembali terlihat lagi,” jelasnya.

Menurutnya, para pendukung juga ada orang-orang beringsang yang tidak ada toleransi. Konflik seperti ini terkadang sengaja diciptakan.

“Bahkan, intimidasi untuk mendukung satu pihak tertentu itu akan ada loh. Misalnya akan ada sebuah perusahaan memaksa karyawannya memilih apabila tidak nurut kena PHK,” ungkap dia.

Dia mengatakan, saat ini, parpol baru memanaskan mesin politik sebelum pilpres, namun potensi konflik tawuran antar pendukung berdasarkan pantauan di medsos sudah mulai terlihat. Selanjutnya, masuk masa kampanye, tensi sudah panas karena konflik di awal berdampak kepada bom waktu ke tahap berikutnya.

Masa kampanye bisa meledaknya berbagai kasus seperti money politic, black campaign, dan bisa terjadi kasus saling lapor. Kemudian, masuk ke masa pencoblosan, akan rawan pada angka penghitungan dan saling klaim kemenangan.

Untuk itu, kepada masyarakat diminta untuk bijaksana dan jangan terpancing politik demi keamanan dan kenyamanan bersama.

“Semua sekarang tergantung kepada masyarakat dan rakyat, kalau mereka cerdas tidak terpancing konflik dan money politic semua aman. Kalau kita bijaksana, tidak terpengaruh dan kenapa harus ribut. Memilih karena uang sama saja kita sengaja mengizinkan orang yang kita pilih itu korupsi untuk mengambil modal dan keuntungan kembali. Intinya kalau masyarakat kita cerdas, konflik juga akan hilang,” terangnya.

Sementara, Polda Sumsel menyatakan hingga saat ini situasi keamanan di masyarakat terkait konflik Pemilu 2024 belum terpantau nyata.

Kabag Ops Polrestabes Palembang, AKBP Hadi Wijaya, mengatakan hingga saat ini belum ada daerah rawan konflik jelang Pemilu dan Pilkada. Namun, mereka tetap siaga menyiapkan personel bila diperlukan.

“Jumlah kerawanan di daerah juga belum termonitor benar. Kalau memang sudah tahu baru kita bisa jumlahkan berapa personel yang dikerahkan ke lapangan,” ujarnya.

Polrestabes Palembang sendiri telah siap untuk menga-

mankan Pemilu dan Pilkada 2024. Namun, diharapkan pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar.

Selain itu, Polda Sumsel juga belum menerima adanya laporan terkait pelanggaran Pemilu 2024, baik dalam hal pemasangan atribut partai, caleg maupun capres.

“Meski demikian juga siap menindaklanjuti jika menerima laporan dengan melakukan penegakan hukum terpadu,” terang Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi.

Sementara itu, berdasarkan hasil kajian akademisi dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Ardiyan Saptawan, ada sedikit perbedaan karakter konflik di Pemilu 2019 dengan 2024. Saat ini, isu politik identitas, simbol cebong dan kampret tidak terlalu menonjol di Pemilu 2024.

Namun, baik Pemilu 2019 maupun 2024 sama-sama tidak lepas dari money politic. Menurutnya, Pileg, Pilpres maupun Pilkada semuanya tidak lepas dari konflik politik uang.

“Konflik politik uang ini hingga sekarang tidak bisa diberangus dan melibatkan banyak orang. Hal ini juga bisa menjadi pemicu terjadi konflik fisik yang melibatkan banyak orang. Salah satunya bisa kita lihat di Pilgub Sumsel yang di beberapa daerah harus dilakukan pemilihan ulang. Hingga kini baik KPU, Bawaslu belum bisa memberantas politik uang ini karena semua melibatkan orang,” terang

mantan anggota KPU Sumsel ini.

Ardiyan mengungkapkan, konflik Cebong-Kampret tidak terlalu berpengaruh di daerah. Di Pemilu 2024, isu itu diprediksi akan hilang karena memang sudah basi. Masyarakat daerah lebih mementingkan ekonomi daripada politik identitas.

Pemilih di Indonesia sendiri terbagi dalam tiga kelompok. Pertama adalah pemilih tradisional. Mereka yang berada di kelompok ini lebih melihat ketokohnya daripada pendidikan, atau kemampuan intelektualnya.

Kedua, pemilih rasional yakni mereka melihat dari program yang disampaikan, termasuk pemilih mapan secara ekonomi serta sulit dipengaruhi dengan uang.

“Jumlah pemilih rasional ini sekarang jumlahnya masih sedikit tapi masih ada. Biasanya banyak terjadi di kota-kota besar,” terang Sekretaris Penjaminan Mutu FISIP Unsri ini.

Ketiga, pemilih swing voters atau pemilih ngambang. Mereka yang tergabung di golongan ini cukup banyak. Tidak ada kriteria apapun di golongan ini karena yang mereka butuhkan adalah ekonomi atau uang.

“Mereka ini juga bisa disebut pemilih tergantung arah angin. Mereka di golongan inilah yang cukup rawan menimbulkan konflik karena siapapun orangnya tidak peduli. Bagi mereka yang penting uangnya,” ucap Ardiyan.

Ardiyan menambahkan, di daerah, pemilih golongan tradisional dan swing voters inilah yang sering berseteru. Bahkan, perseteruan ini bahkan melibatkan sanak keluarga hingga akhirnya menimbulkan bentrokan fisik.

Konflik-konflik inilah yang perlu diantisipasi sejak sekarang agar bisa dicegah, baik oleh KPU, Bawaslu, Kepolisian maupun lembaga penyelenggara Pemilu lainnya.

•RDR





“Selama menjabat gubernur, Arinal Djunaidi telah berhasil membangun Lampung”



*Ismet Roni*

# NGANTRE MENANTANG ARINAL DJUNAIDI DI LAMPUNG

**Gubernur Lampung petahana, Arinal Djunaidi, dipastikan akan maju lagi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk periode keduanya sebagai orang nomor satu di provinsi berjuduk Sai Bumi Ruwa Jurai.**

**D**ewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lampung juga sudah menegaskan dukungannya terhadap Arinal Djunaidi sebagai bakal calon gubernur di Pilkada 2024 yang diputuskan usai Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) 2024, beberapa bulan lalu.

Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung, Ismet Roni, menegaskan, saat Rapimda semua sepakat untuk kembali mendukung Arinal Djunaidi sebagai calon gubernur.

Menurutnya, selama menjabat gubernur, Arinal Djunaidi telah berhasil membangun Lampung. Maka dari itu, Partai Golkar yakin bisa mendukung pria kelahiran Bandar Lampung, 17 Juni 1956 itu.

“Berdasarkan landasan tersebut, kami meyakini Arinal untuk menjabat sebagai gubernur Lampung dua periode,” jelas Ismet Roni.

Ismet menjelaskan, secara objektif, Arinal Djunaidi adalah pemimpin terbaik yang mampu membawa Lampung menuju kesuksesan.

Sementara itu, Arinal Djunaidi nampaknya masih enggan membicarakan sosok pendampingnya di Pilgub Lampung 2024. Meski begitu, Arinal memberikan isyarat akan menentukan pilihan sebulan sebelum masa kampanye Pemilu 2024 pada November 2023.

“Masih belum kita bahas itu, tunggu September,” kata Arinal.

Namun, niat Arinal Djunaidi untuk tetap menjabat sebagai gubernur Lampung dua periode tampaknya akan sulit karena banyak nama besar yang juga ikut mencalonkan diri.

Sebut saja Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu dua periode yang masa jabatannya akan berakhir pada September 2023. Dia dikabarkan akan

meramaikan Pilgub Lampung 2024. Helmi merupakan adik dari Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Helmi Hasan telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti Pilgub Lampung 2024 dan menguraikan beberapa program yang akan ia lakukan untuk mengembangkan politik di tanah kelahirannya.

“Kalau untuk kebaikan yang lebih besar, maka kita pasti akan mengambil bagian dalam kebaikan itu,” ujarnya.

Menurut Helmi, salah satu prioritas utamanya adalah terkait infrastruktur jalan. “Kalau Insya Allah sesuai keinginan, maka targetnya dalam setahun semua jalan provinsi dalam kondisi baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia bermaksud untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Lampung dengan mengatasi permasalahan yang ada di rumah sakit.

“Kami akan memberikan layanan salon gratis kepada pasien. Mereka tidak boleh keluar sampai penyakitnya sembuh dan mendapat layanan salon. Ini salah satu cara untuk bermartabat pasien,” ungkapnya.

Program layanan kesehatan lain yang ia impikan adalah penyediaan ambulans gratis yang mencakup seluruh desa di Lampung.

“Kami juga mempunyai program untuk membantu pelepasan ijazah mahasiswa atau sarjana yang ditahan atau tidak dapat diambil. Kami

siap memberikan dana yang diperlukan atau dukungan lain untuk membantu mahasiswa tersebut,” imbuhnya.

Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim, dengan tegas menyebut salah satu kader potensial yang akan ikut dalam kontestasi Pilgub Lampung 2024.

“Kami melihat nama Al Muzammil Yusuf muncul sebagai salah satu calon potensial, namun proses ini masih akan terus berkembang,” katanya.

Pada Pileg 2024, partai dengan lambang bulan dan padi ini bertekad untuk memaksimalkan pencalonan anggota legislatif dari kalangan muda. Upaya ini bertujuan untuk mencapai atau bahkan melampaui target jumlah kursi yang ditetapkan.

Ada pula nama Umar Ahmad dan Sutono dianggap sebagai alternatif yang berpotensi membangun Lampung ke depan.

Menurut akademisi dari Universitas Lampung, Darmawan Purba, pasangan Umar Ahmad dan Sutono akan menjadi pilihan alternatif yang baik.

Umar Ahmad memiliki potensi untuk menggerakkan pembangunan di Lampung dengan dukungan

dari partai yang memenangkan pemilu. Umar Ahmad juga memiliki

liki keterkaitan dengan PDIP dan rekam jejaknya yang terbukti dapat menjadi aset dalam pencapaian pembangunan. Ketika berkolaborasi dengan Sutono, mereka menjadi pasangan yang mengusung perubahan bagi Lampung.

Darmawan berpendapat, PDIP harus merekrut, merekomendasikan, dan mendukung kader-kader terbaiknya untuk memimpin daerah dan memenuhi harapan masyarakat.

Sebagian besar masyarakat percaya bahwa PDIP memiliki peluang besar untuk memenangkan Pemilu 2024 dengan mengusung calon presiden Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi.

Jika wacana pasangan Umar Ahmad dan Sutono diwujudkan, kemenangan PDIP akan memberikan dorongan positif bagi tokoh-tokoh politik lokal di Lampung, terutama bagi kader-kader PDIP.

Meskipun tidak ada rumusan resmi, kombinasi antara Umar Ahmad dan Sutono mewakili dua etnis terbesar yaitu Jawa dan Lampung. Ini merupakan pola umum dalam setiap pemilihan kepala daerah di Lampung.

Umar Ahmad adalah seorang politisi berpengalaman dalam kepemimpinan daerah dan diakui telah berhasil membawa perubahan positif di Kabupaten Tulangbawang Barat. Pengalaman pembangunan di daerah tersebut dianggap sebagai modal sosial bagi Umar Ahmad dalam membawa perubahan di Lampung.

Sementara itu, Sutono memiliki pengetahuan mendalam tentang birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pengalamannya sebagai mantan Sekretaris Daerah Lampung dan saat ini sebagai Sekretaris PDIP Lampung memberikan kontribusi berharga bagi pasangan ini. •  
IRY







“Kita hadir untuk melayani umat, merawat Indonesia. Jika takut dengan tantangan, sebaiknya tidak mengambil risiko yang berarti”

Ahmad Syaikh

# ANDRE ROSIADE SUDAH PEDE SIAP GUSUR GUBERNUR PETAHANA

**Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, dianggap sebagai calon kuat untuk posisi gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.**

Meski begitu, Andre enggan berspekulasi dan lebih memilih fokus pada upaya memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Saya enggan untuk berspekulasi. Sebagai kader Partai Gerindra, fokus utama kami saat ini adalah Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Tugas kami adalah memenangkan Pak Prabowo,” ujar Andre Rosiade.

Andre yang juga anggota Komisi VI DPR berpendapat, apabila Prabowo Subianto menjadi Presiden, maka isu keterbelakangan pembangunan di Sumbar juga akan dapat diselesaikan dengan lebih baik.

Ia memberikan contoh jika Prabowo menjadi presiden dan dirinya menjadi gubernur, kolaborasi dan komunikasi antara keduanya akan menjadi lebih lancar, yang pada akhirnya akan mempercepat proses pembangunan.

“Pak Prabowo menjadi Presiden akan membuka peluang komunikasi yang lebih efektif,” ungkap Andre yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Andre menyatakan, jika presiden adalah Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan, maka konteks seperti itu tidak akan terjadi. Dia meyakini, Prabowo akan dengan mudah mendukung usulan semacam ini. Bahkan, ada kemungkinan bahwa Prabowo akan menghubungi beberapa menteri untuk mendukung rencana pembangunan di Sumbar.

Lebih lanjut, sebagai Juru Bicara Partai Gerindra, Andre mengungkapkan banyak masyarakat di Tanah Minang yang meng-

harapkan dirinya maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada 2024. Masyarakat telah mengamati kinerjanya yang baik selama menjabat sebagai anggota Dewan DPR, sehingga dianggap layak untuk memimpin di Sumatera Barat.

“Kami merasa tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, harapan masyarakat pada 2024, kami membutuhkan pemimpin baru yang mampu membangun Sumbar. Salah satu tokoh yang diharapkan oleh masyarakat adalah Andre Rosiade,” tutur Andre dengan yakin.

Dia juga mengumumkan tujuan ambisinya untuk meraih pergantian gubernur dalam kontestasi Pemilu 2024. Ia berpendapat bahwa partainya harus mencari sosok gubernur baru agar pembangunan di Sumbar dapat berjalan lebih lancar.

Menurut pandangan Andre, saat ini, Sumbar memerlukan perubahan positif. Diperlukan pemimpin baru yang memiliki kemampuan lebih baik dalam bekerja sama dengan seluruh kepala daerah di wilayah tersebut.

Andre juga mengkritik kepemimpinan Mahyeldi, gubernur petahana saat ini, dengan menyebut bahwa pemerintah provinsi belum mampu membangun sinergi yang memadai

antara kepala daerah tingkat kabupaten dan kota serta dengan pemerintah pusat.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Gerindra Sumbar, Hidayat, menambangkan, target utama pada Pemilu 2024 adalah memenuhi syarat untuk mengusung kandidat gubernur dari partai mereka sendiri.

“Di Sumatera Barat, tujuan utama kami tentu saja adalah meraih kemenangan. Namun bukan hanya itu, kami juga bertekad untuk mampu mengusung kandidat gubernur dari partai kami sendiri,” ungkap Hidayat.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikh, mengindikasikan untuk mendukung gubernur petahana Sumbar, Mahyeldi Ansyarullah, dalam Pilgub Sumbar 2024. Syaikh berpendapat, kepemimpinan Mahyeldi di Sumbar sebaiknya diperpanjang selama dua periode.

“Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah harus dilanjutkan dua periode. Kita hadir untuk melayani umat, merawat Indonesia. Jika takut dengan tantangan, sebaiknya tidak mengambil risiko yang berarti. Jika terdapat keragu-ragu-

an, mungkin lebih baik untuk tidak

mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari partai manapun,” ungkapnya.

Syaikh menekankan tekad kader PKS di Sumbar untuk meraih kemenangan dalam kontestasi Pemilu tanpa memandang kondisi apapun. Ia menegaskan bahwa semua sumber daya harus dimobilisasi demi mencapai tujuan tersebut.

“Dengan demikian, mereka dapat membentuk tim yang kompak, saling berbagi tanggung jawab, berkolaborasi, dan bersinergi untuk meyakinkan masyarakat di wilayah pemilihan masing-masing,” ujar Ahmad Syaikh.

Dalam sebuah acara pelantikan pengurus DPW NasDem Sumbar beberapa waktu lalu, Mahyeldi terlihat seperti menggoda Fadly Amran untuk menjadi pasangannya dalam Pilgub Sumbar 2024.

“Barangkali ke depan bisa berdampingan?” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga memberikan pujian atas rekam jejak Fadly Amran sebagai pimpinan wilayah NasDem Sumbar dan Wali Kota Padang Panjang. Ia mengakui bahwa Fadly Amran memiliki catatan prestasi yang patut diperhitungkan.

Fadly Amran yang merupakan Ketua DPW Partai NasDem Sumbar dan juga Wali Kota Padang Panjang, merespons ucapan Mahyeldi dengan santai. Ia melihat pernyataan Mahyeldi sebagai ajakan untuk bersama-sama membangun Sumbar, bukan sebagai ajakan pribadi untuk berpasangan dalam Pilgub Sumbar 2024.

Menurut Fadly Amran, Mahyeldi lebih berbicara mengenai kebersamaan partai-partai politik dalam upaya membangun Sumbar.

“Mungkin karena momentumnya kegiatan Partai NasDem. NasDem dan PKS juga sama-sama mengusung bacapres yang sama yakni Anies Baswedan,” katanya.

Fadly Amran menambahkan, pernyataan Mahyeldi bukanlah ajakan langsung kepadanya secara pribadi, melainkan lebih kepada kerja sama antara Partai NasDem dan PKS dalam mendukung calon presiden yang sama, yaitu Anies Baswedan. ●IRY





“Sejak Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar, dia memiliki kesempatan untuk dicalonkan oleh Partai Golkar dalam setiap pemilihan kepala daerah”

*Ace Hasan Syadzily*



# RIDWAN KAMIL DIPASTIKAN PINDAH DARI JABAR KE JAKARTA

**Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memiliki tiga pilihan saat tahun politik 2024 berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga yang dianggapnya meyakinkan. Pilihan-pilihan tersebut berkaitan dengan posisi yang akan diambilnya dalam pesta demokrasi tersebut.**

Pilihan pertama adalah kemungkinan Ridwan Kamil kembali maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat untuk periode kedua.

Dalam konteks ini, dia mengutip hasil survei kepuasan publik pada April 2023 yang mencapai 90,6 persen. Selain itu, adanya dukungan sebanyak 70 persen dari responden yang menginginkannya untuk memimpin kembali Jawa Barat.

Pilihan kedua adalah kemungkinan maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Meskipun mengaku jarang beraktivitas atau berinteraksi dengan masyarakat di ibu kota, Ridwan Kamil mengapresiasi dorongan yang muncul dari masyarakat untuk melihatnya sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.

Isu tentang kemungkinan pencalonannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 muncul setelah namanya menduduki peringkat teratas dalam beberapa hasil survei.

“Tidak ada yang tahu mengapa nama saya menjadi bagian

dari perbincangan mengenai Pilgub DKI. Saya sendiri merasa kaget,” jelasnya.

Meskipun demikian, Ridwan Kamil mengakui bahwa hasil survei yang positif di DKI Jakarta terasa agak mengejutkan. “DKI survei bagus, padahal saya enggak pernah jalan-jalan di Sudirman, Thamrin car free day kan enggak ada, bisa saja tapi enggak bisa diputuskan sekarang,”

katanya.

Tidak hanya menjadi calon gubernur, Ridwan Kamil juga menyadari bahwa elektabilitasnya dalam survei sebagai bakal calon wakil presiden juga menguat dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menjadi pilihan ketiga yang mungkin diambilnya. Namun, dia menegaskan bahwa takdir politik tidak hanya ditentukan oleh hasil survei.

Di tengah ketiga pilihan tersebut, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menyatakan saat ini pilihan paling rasional bagi dirinya adalah memilih untuk menjadi gubernur Jawa Barat dalam periode kedua.

“Yang paling rasional bagi saya saat ini adalah menjadi gubernur Jabar untuk periode kedua. Jadi saya akan fokus pada jalur ini. Meskipun, jangan terkejut jika suatu hari nanti takdir memutuskan arah yang berbeda,” tambahnya.

Belum lama ini, Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengatakan, Ridwan Kamil berkesempatan mengikuti pilkada sejak bergabung dengan Partai Golkar.

“Sejak Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar, dia memiliki kesempatan untuk dicalonkan oleh Partai Golkar dalam setiap pemilihan kepala daerah,” kata.

Menilik kemungkinan sukses, Ace mengungkapkan Ridwan Kamil harus mempertimbangkan untuk mencalonkan diri lagi di Pilgub Jabar. Hal ini disebabkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja mantan Wali Kota Bandung tersebut.

“Hal ini terlihat dari kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerjanya sebagai gubernur Jawa Barat. Begitu

pula dengan pemilihan

jukkan potensi yang signifikan,” ujarnya.

Meski demikian, Ace menilai Ridwan Kamil juga berpeluang menang jika maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ia yakin gaya kepemimpinan Ridwan Kamil sudah terbukti semasa menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.

“Adapun kemungkinan dia pindah ke Jakarta pada akhirnya tergantung kepentingannya dan apakah dia mau ke Jakarta atau tidak. Mengenai kecocokannya untuk Jakarta, sebagai gubernur di Jawa Barat, dia telah menunjukkan kepemimpinan yang efektif di daerahnya,” ucap Ace.

Pemerhati politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan, berpendapat, terdapat beberapa keuntungan jika Ridwan Kamil mencalonkan diri untuk periode kedua dalam Pilgub Jabar. Menurutnya, Kang Emil memiliki peluang kemenangan yang lebih besar dalam konteks ini.

Fakta menunjukkan, hingga saat ini, elektabilitas Kang Emil di Pilgub Jabar adalah yang tertinggi dan terpaut jauh dengan pesaing lainnya. Selain itu, tingkat kepuasan publik terhadapnya juga mencapai lebih dari 80 persen.

“Oleh karena itu, secara rasional, peluang kemenangannya di Pilgub Jabar tentu cukup tinggi,” ungkap Firman.

Sementara jika memutuskan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta, Kang Emil memiliki kelebihan terkait gaya kepemimpinan yang sesuai untuk wilayah perkotaan. Menurutnya, karakter kepemimpinan Kang Emil sangat cocok untuk wilayah seperti Jakarta yang merupakan kawasan perkotaan.

“Namun, ini lebih berkaitan dengan karakter kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Kang Emil lebih sesuai untuk pemimpin di wilayah perkotaan. Ini terlihat dari pengalaman dia di Kota Bandung dan upayanya dalam penataan infrastruktur di Jawa Barat,” ungkapnya.

Firman juga membahas beberapa kelemahan yang mungkin dimiliki oleh Kang Emil jika ia mencalonkan diri dalam Pilgub Jabar. Ia mengemukakan bahwa Kang Emil mungkin memiliki tantangan khusus dalam menangani masalah di pedesaan di Jawa Barat.

Untuk Pilgub DKI Jakarta, Kang Emil dianggap belum memiliki basis dukungan yang kuat, berbeda dengan situasi di Jawa Barat, di mana dukungannya lebih jelas. Meskipun beberapa survei menunjukkan elektabilitasnya tinggi, hal itu tidak sebanding dengan dukungan di Jawa Barat.

Oleh karena itu, potensi kemenangannya di Jawa Barat lebih besar pada saat ini. Namun, karakter kepemimpinan Kang Emil dianggap lebih cocok untuk DKI Jakarta. ●IRY







“Nama-nama yang berpotensi muncul berasal dari kepemimpinan partai, terutama dari PDIP yang merupakan partai terkuat di Jateng”

Teguh Yuwono

# KADER BANTENG TERKUAT DI JATENG

**Masyarakat Jawa Tengah kini menantikan siapa yang akan menggantikan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.**

Beberapa tokoh di Jawa Tengah dianggap memiliki potensi untuk menggantikan posisi Ganjar dan Taj Yasin. Mereka di antaranya mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi; Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka; dan Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Nama lain yang muncul adalah Bupati Batang, Wihaji; Bupati Kendal, Dico Ganinduto; dan Presiden Direktur PT Sido Muncul, Irwan Hidayat. Mereka semua dianggap memiliki potensi maju Pilgub Jateng 2024.

Selain itu, ada pula Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng, Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, yang berasal dari kalangan religius dan juga dianggap sebagai kandidat yang mampu menggantikan Taj Yasin Maimoen.

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono, mengungkapkan, nama-nama yang berpotensi muncul berasal dari kepemimpinan partai, terutama dari PDIP yang merupakan partai terkuat di Jateng.

“Setiap tokoh yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan partai di Jawa Tengah harus memiliki keberanian untuk mencalonkan diri sebagai gubernur,” ungkapnya.

Menurut Teguh, ada tiga nama yang paling potensial, yaitu Bambang Pacul, Gibran Rakabuming Raka, dan Hendrar Prihadi.

“Pencarian fokus pada tokoh-tokoh yang telah berhasil memimpin di PDIP,

baik sebagai bupati/wali kota atau wakil gubernur, dengan pilihan utama antara mantan wali kota Semarang dan wali kota Solo,” bebernya.

Namun, Teguh mengungkapkan, keputusan akhir akan diambil setelah pengumuman calon wakil presiden. Terutama, perhatian tertuju pada Gibran Rakabuming yang diantisipasi sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.

Keterlibatan Bambang Pacul, kata Teguh, dalam politik sejak 2004 dan posisinya sebagai Ketua DPD PDIP Jateng membuatnya memiliki koneksi dengan kondisi dan masyarakat Jateng. Meski begitu, Teguh merasa Bambang Pacul lebih tertarik dengan peran di dalam struktur partai politik daripada menjadi gubernur.

Sementara, Ketua DPW PPP Jateng, Masruhan Samsurie, ikut menanggapi munculnya nama Gus Yusuf dan Bambang Pacul sebagai tokoh yang berpotensi menjadi calon gubernur pada Pilgub Jateng 2024.

Samsurie mengungkapkan, keikutsertaan para pimpinan partai dalam kontestasi politik ini menunjukkan bahwa proses kaderisasi partai berjalan dengan baik.

Menurutnya, langkah ini akan menguatkan citra partai, terutama dalam konteks Bambang Pacul dari PDIP yang diusulkan oleh sejumlah pengamat sebagai calon gubernur Jateng.

“Saya melihat ide ini sebagai suatu inovasi yang sangat baik untuk memperkuat citra partai. Jika ketua partai diusung dalam pemilihan, maka citra partai akan meningkat, dan pendidikan politik terkait dengan kade-

risasi akan semakin berkualitas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Masruhan mengatakan, akar kuat suatu partai bermula dari proses pengkaderan yang baik. Ia percaya bahwa eksistensi PDIP yang kuat di Jateng dapat memaksimalkan demokrasi melalui pendekatan pengkaderan yang baik.

“Dengan eksistensi PDI Perjuangan di Jateng diyakini akan memaksimalkan demokrasi melalui pendekatan pengkaderan yang baik,” jelasnya.

Dalam pandangannya, penghargaan publik terhadap suatu partai dan pengkaderan yang efektif akan memungkinkan partai tersebut berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi.

Dengan demikian, Masruhan ber-

harap PDIP di Jateng akan mengusung Bambang Pacul sebagai calon gubernur dalam Pilgub 2024. Dia juga mendorong partai-partai lain untuk mengusulkan ketua mereka masing-masing.

Walaupun ada kemungkinan untuk mencalonkan diri dalam Pilgub Jateng, Samsurie menyatakan, dia lebih memilih untuk mendukung sistem dan berharap hasil terbaik di masa depan.

“Figur terbaik dari partai-partai di Jateng harus turut serta dalam Pilgub 2024 untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Jawa Tengah,” ulasnya.

Samsurie pun mendorong Bambang Pacul serta ketua-ketua partai besar seperti Gerindra, Golkar, dan lainnya untuk ikut serta dalam kontestasi ini.

Sebelumnya, Ketua DPW PKB Jateng, Gus Yusuf, mengakui beberapa partai mulai berkomunikasi terkait Pilgub 2024. “Beberapa partai mulai berkomunikasi dengan PKB, tentu ini baru penjajakan karena partai apa pun hari ini masih konsentrasi pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden,” tambahnya.

Berdasarkan hasil Rakerwil DPW PKB Jateng beberapa waktu lalu, Gus Yusuf akan diusung PKB sebagai calon gubernur Jateng.

“Alhamdulillah respons dari berbagai komunitas positif, juga tentu dari kalangan internal kami di kalangan pesantren, kalangan keluarga besar NU ini sangat menyambut baik munculnya figur dari pesantren untuk maju pada kontestasi 2024,” katanya. ●IRY





“Lima kompetensi dasar yang harus dimiliki pengawas pemilu yaitu pengetahuan, kompetensi teknis, kompetensi khusus, advokasi dan kompetensi individual”

Herwyn JH Malonda



# ANGGOTA BAWASLU HARUS BELAJAR HUKUM

**Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menunggu pengajuan sengketa terkait penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).**

“Kita masih menunggu laporan dari calon yang ingin mengajukan permohonan sengketa di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia,” kata Anggota Bawaslu, Totok Hariyoni, Rabu, 23 Agustus 2023.

Totok menyampaikan, Bawaslu masih melakukan perekaman terhadap nama-nama calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Memenuhi Syarat (MS). KPU telah mengumumkan dokumen DCS bakal caleg yang memenuhi syarat sebanyak 9.919 dengan komposisi 6.245 laki-laki dan 3.674 perempuan.

Kendati begitu, Totok belum bisa menyampaikan jumlah bakal caleg yang telah mengajukan sengketa kepada Bawaslu.

Kata Totok, pihaknya siap menerima gugatan atau sengketa yang diajukan bakal caleg.

“Kami masih recap calon yang TMS atau MS yang mengajukan permohonan sengketa ada berapa?” kata Totok.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta kepada seluruh anggota Bawaslu daerah, khususnya yang mengemban Divisi Penyelesaian Sengketa, untuk menguasai dan menerapkan asas kepastian hukum dalam penegakan sengketa proses pemilu.

Apalagi,

KPU sudah menetapkan DCS Bacaleg DPR dan DPD. Bagja mengungkapkan, masa penetapan DCS masih ada satu tahapan lagi yakni Daftar Calon Tetap (DCT). Kata Bagja, penetapan DCT sangat rawan sengketa.

“Di pemilu, segala prosedur itu pasti. Hanya satu yang belum pasti, hasil pemilu. Itulah yang harus teman-teman lakukan, kepastian hukum,” kata Bagja saat membuka Rakernis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Gelombang I, Senin, 22 Agustus 2023.

Menurutnya, penguasaan ilmu hukum bagi anggota Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota sangat penting. Meskipun tidak semua anggota Bawaslu daerah tidak memiliki latar belakang hukum. Namun, seluruh anggota harus memahami prosedur yang terkait dengan sengketa Pemilu ini.

Tidak memiliki latar belakang ilmu hukum, bukan berarti menjadi alasan untuk tidak mempelajari dasar-dasar hukum karena mengampu divisi penyelesaian sengketa, erat kaitannya dengan proses hukum.

Bagja menjelaskan, anggota Bawaslu daerah harus mampu membedakan mana alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara pada proses pembuktian. Sebab, bila anggota tidak dapat membuktikan dan membedakan alat bukti

dan barang bukti, maka akan fatal dalam penentuan atau keputusan suatu sengketa Pemilu di persidangan. “Jadi, bapak

dan ibu harus menguasai hukum. Karena akan menjadi pemutus proses sengketa pemilu,” ujar Bagja.

Pria lulusan Universitas Indonesia itu menyampaikan, suksesnya Bawaslu dalam mengemban tugas, tercermin dalam dua indikator yaitu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.

“Jika keduanya berhasil Bawaslu berjalan dan selesai dengan sukses, maka itu kesuksesan Bawaslu sebenarnya,” jelas Bagja.

Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, meminta agar seluruh jajaran anggota Bawaslu daerah untuk menjaga integritas lembaga.

Herwyn mengatakan, setiap jajaran Bawaslu di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus saling menjaga nama baik lembaga. Dia berharap seluruh jajaran dapat saling berkolaborasi dan bekerja keras untuk memperkuat pengawasan pemilu menuju pengawasan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Anggota Bawaslu daerah harus jaga muarah pengawas pemilu,” tutur Herwyn di Bogor, Rabu, 23 Agustus 2023.

Menurutnya, sebagai pemimpin di Bawaslu kabupaten/kota perlu menjaga muarah. Salah satunya dengan memperbanyak pengetahuan tentang Pemilu. Bahkan, regulasi yang telah ada untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasan.

“Orang yang mengawasi harus lebih pintar dari orang yang diawasi, perbanyak ilmu pengetahuan kepemiluan salah satu caranya,” ungkap pria asal Sulawesi Utara itu.

Herwyn juga berharap anggota Bawaslu dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki kompetensi-kompetensi dasar pengawas Pemilu guna menunjang

kerja-kerja pengawasan di daerah masing-masing. Sebab, tahapan Pemilu terus berjalan.

Maka dari itu, Herwyn meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk siap menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Selain itu, harus tetap menjunjung tinggi integritas. Apalagi, terdapat banyak potensi pengajuan sengketa Pemilu. Kata Herwyn, jajaran Bawaslu harus siap menghadapi berbagai gugatan nantinya.

Oleh karena itu, jajaran Bawaslu di provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk meningkatkan kompetensinya terkait regulasi dan pengetahuan hukum kepemiluan. Sehingga, nantinya siapa menghadapi gugatan yang dilayangkan berbagai pihak.

“Lima kompetensi dasar yang harus dimiliki pengawas pemilu yaitu pengetahuan, kompetensi teknis, kompetensi khusus, advokasi dan kompetensi individual,” tutur Herwyn.

Kordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Kornas JPPR), Nurlia Dian Paramita, mengatakan, anggota Bawaslu dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus bekerja secara cermat, khususnya pada tahapan penetapan bakal caleg untuk DPR dan DPD.

“Perlu mendapatkan atensi dari Bawaslu sebagai informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu,” kata perempuan yang akrab disapa Mita itu.

Dia mengingatkan kepada jajaran Bawaslu untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU.

“Jangan sampai Bawaslu tidak mengawasi prosesnya,” tutur Mita.

Keteledoran Bawaslu sudah mulai terlihat ketika tidak melakukan pengawasan melekat terhadap penetapan DCS yang diumumkan oleh KPU. Terdapat kesalahan jumlah DCS dan hal itu pertama kali diungkap oleh masyarakat.

“Apalagi mengingat hal tersebut diketahui oleh masyarakat, bukan oleh Bawaslu yang telah melakukan pengawasan melekat,” ucap Mita.

Dia menegaskan, seharusnya Bawaslu memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Pemilu. Tidak ada alasan bagi Bawaslu untuk tidak mengawasi proses Pemilu. Sebab, UU 7/2017 tentang Pemilu sudah memerintahkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara melekat.

“Tidak ada alasan kurangnya akses silon kepada Bawaslu. Publik hanya menagih keseriusan dan komitmen Bawaslu dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap dugaan pelanggaran Pemilu,” pungkas Mita. ●RDO







“Ini tentu sangat aneh dan perlu diberikan atensi. Tidak hanya selesai dengan klaim kesalahan input data”

Nurlia Dian Paramita

INFO  
KPU

15

Minggu V • Agustus 2023

# GAWAT DCS SALAH, TANDA AWAL PEMILU BURUK

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024.**

**N**ama-nama DCS bakal caleg DPR itu telah resmi diumumkan setelah KPU melakukan kegiatan verifikasi administrasi dokumen para peserta dan dinyatakan lolos verifikasi. KPU mengumumkan, dari total 10.323 bakal caleg DPR yang telah didaftarkan 18 parpol, hanya 9.925 yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai DCS.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengungkapkan, usai terdaftar di dalam DCS, masyarakat juga dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama bakal caleg tersebut. Masukan, kritik atau tanggapan tersebut dapat diajukan masyarakat melalui beberapa tingkatan yang dikategorikan.

Hasyim menjelaskan, bagi DCS bakal caleg DPR, masyarakat dapat mengajukan langsung ke KPU pusat. Sementara, DCS bakal caleg DPRD provinsi, masyarakat dapat mengajukan ke KPU Provinsi. Sedangkan, untuk DCS bakal caleg DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat dapat mengajukan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Dapil dari para calon tersebut.

Menyikapi hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menyoroti DCS yang sudah resmi ditetapkan oleh KPU. Lucius menilai terdapat ketidakcermatan hitungan KPU soal data DCS bakal caleg DPR.

Lucius mengungkapkan, ketidakcermatan hitungan itu ditemukan dari hasil pencermatan yang dilakukan Formappi atas dokumen DCS yang telah diumumkan oleh KPU. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil kegiatan pencermatan, pihaknya menemukan adanya ketidaksinkronan total jumlah bakal caleg yang dinyatakan memen-

uhi syarat serta jumlah hasil rekapitulasi caleg laki-laki dan perempuan.

Lucius menerangkan, ketidaksinkronan DCS bakal DPR tersebut dikategorikan berdasarkan latar belakang jenis kelamin, di mana laki-laki berjumlah 6.245 dan perempuan 3.674.

Dia menuturkan, setelah ditotal, dari jumlah bakal caleg laki-laki dan perempuan itu ternyata didapatkan hasil jumlah keseluruhan sebanyak 9.919. Jumlah itu berbeda dengan pengumuman yang sebelumnya disampaikan KPU.

“Jadi, data KPU mencatat jumlah caleg yang memenuhi syarat sebanyak 9.925. Angka 9.925 caleg ini tidak sama dengan total jumlah caleg berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari 6.245 caleg laki-laki dan 3.674 caleg perempuan, yang kalau ditotalkan menjadi 9.919,” ungkap Lucius dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Agustus 2023.

Lucius mengungkapkan, ketidaksinkronan jumlah keseluruhan bakal caleg yang ditetapkan dalam DCS itu menimbulkan pertanyaan. Selain itu, Lucius menilai, ketidaksinkronan data itu bersumber dari sikap ketidakcermatan KPU yang telah menginput dan menjumlahkan caleg yang Memenuhi Syarat (MS).

“Ketidaktelitian ini merupakan awal yang buruk bagi kita untuk mengawal Pemilu yang jujur dan adil. Apalagi, KPU sendiri nampak tak sedikitpun punya semangat untuk menjamin pemilu yang jujur ketika mereka lebih suka menutup-nutupi biodata bakal caleg,” kata Lucius.

Lucius menjelaskan, pada data dokumen Partai Gelora, diketahui jumlah

bakal caleg sebanyak 396 dengan rincian 252 laki-laki dan 145 perempuan. Jika ditotal, maka hasilnya sebanyak 397.

Menurut Lucius, penghitungan yang tepat dan juga cermat mestinya bakal menghasilkan angka yang sama antara jumlah caleg yang Memenuhi Syarat dan total caleg laki-laki dan perempuan.

Selain itu, hal serupa terjadi pada Partai Garuda, di mana tercatat jumlah caleg yang memenuhi syarat 573. Sementara gabungan caleg laki-laki dan perempuan menghasilkan angka 570 yang terdiri dari 336 laki-laki dan 234 perempuan.

Lalu, Partai Bulan Bintang (PBB) juga mengalami hal serupa. Jumlah caleg yang memenuhi syarat 474, sedangkan penggabungan jumlah caleg laki-laki dan perempuan 470.

“Ketidaksinkronan angka-angka penjumlahan di atas seharusnya membuat DCS yang ditetapkan oleh KPU otomatis cacat,” ujar Lucius.

Dia menambahkan, sulit untuk memahami bagaimana ketidakcermatan tidak disadari oleh Komisioner KPU sebelum mereka nampak gagah mengumumkan DCS. “Atau kalau ketidaksinkronan ini sesuatu yang disengaja oleh KPU, haruslah kita pertanyakan untuk siapa KPU ini bekerja,” ujarnya.

“Ironisnya, sudah tertutup, mereka justru malah mengharapkan publik mempelajari track record caleg. Dimana publik bisa mengetahui track record bakal caleg jika KPU sebagai satu-satunya sumber informasi kredibel justru tak punya niat untuk menyediakan informasi terkait rekam jejak para caleg,”

tegasnya.

Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik, mengakui memang terdapat ketidaksinkronan data DCS. Namun, ketidaksinkronan data DCS bakal caleg DPR itu terjadi lantaran adanya dugaan kesalahan input saat hendak memasukan dokumen tersebut.

“Tidak berubah, hanya ada typo dalam input data di slide presentasi,” kata Idham.

Kendati demikian, Idham memastikan, data tersebut tidak berubah dari apa yang telah disampaikan oleh KPU. Idham mengklaim, ketidaksinkronan data DCS bakal caleg DPR tersebut disebabkan lantaran adanya kesalahan input data dalam proses rekapitulasi akhir sebelum diumumkan kepada publik.

Sementara itu, Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR) juga turut menyoroti ketidaksinkronan data DCS bakal caleg DPR. Koordinator Nasional JPPR, Nurlia Dian Paramita, menilai, KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya seharusnya lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi data DCS bakal caleg DPR.

“Bahwa tidak sepatutnya kesalahan input data itu terjadi telah di KPU sebagai pihak lembaga penyelenggara pemilu. Hal tersebut tentu berdampak terhadap publik dalam menaruh kepercayaan penyelenggaraan pemilu kepada KPU sebagai pelaksana teknis,” kata Mita.

Mita menilai, kesalahan input data tersebut seharusnya tak lagi terjadi lantaran KPU dalam merekapitulasi dokumen telah menggunakan sistem elektronik yang cukup canggih. Kesalahan input data itu juga seharusnya tidak terjadi, apalagi data itu telah diproses melalui serangkaian tahapan verifikasi administrasi terhadap persyaratan bakal caleg.

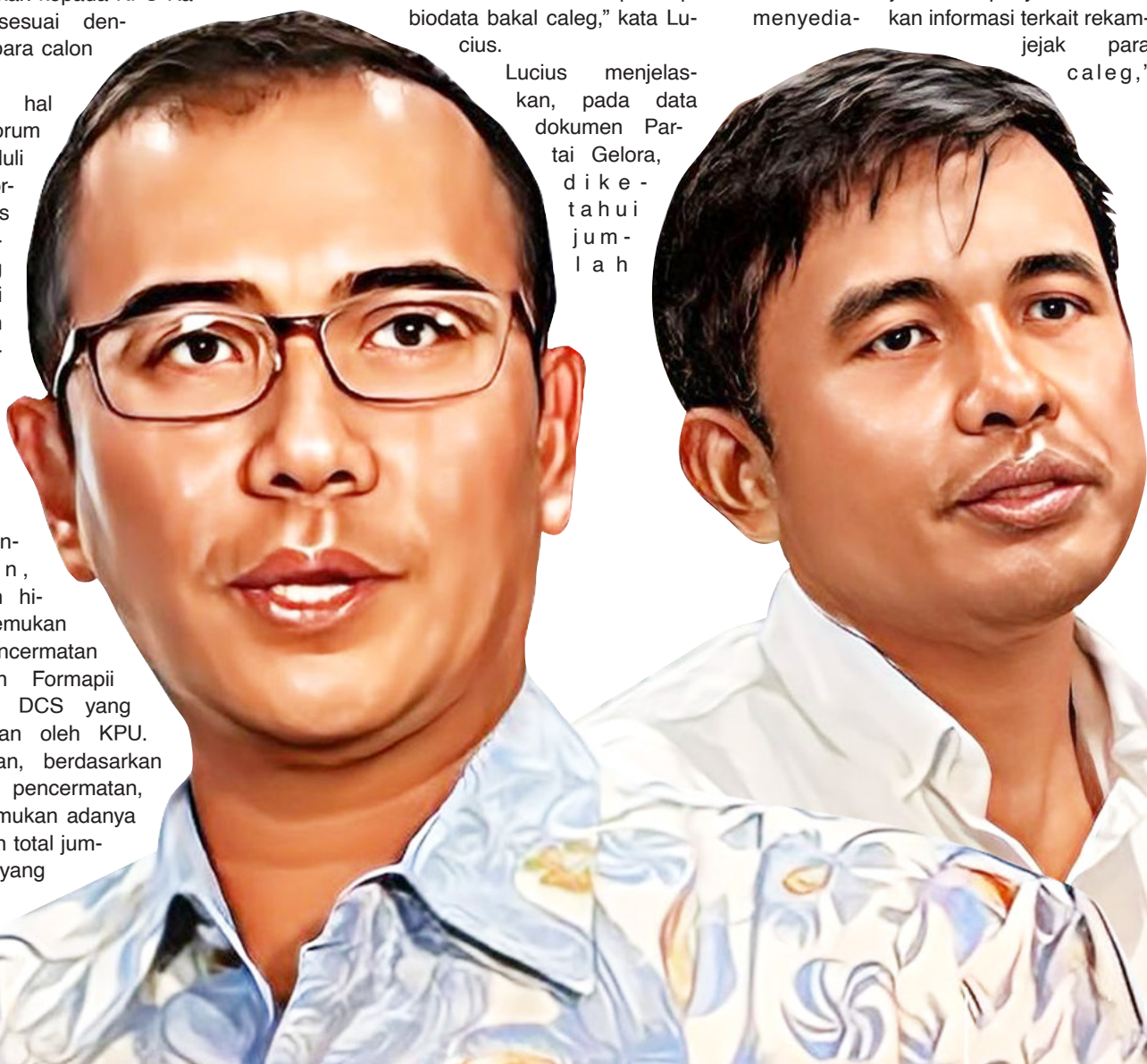
“Ini tentu sangat aneh dan perlu diberikan atensi. Tidak hanya selesai dengan klaim kesalahan input data,” tuturnya.

Berdasarkan hal itu, JPPR mendorong KPU agar dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan kesalahan lagi ke depan, khususnya dalam hal sinkronisasi data yang berkaitan dengan angka.

Selain itu, Mita mengingatkan, kesalahan input data itu bukanlah hal yang biasa, namun melanggar peraturan kode etik penyelenggara pemilu soal sumpah dan janji penyelenggara.

Mita menambahkan, aturan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nonomr 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Jadi jangan sampai ke depan terhadap data tahapan yang akan berlangsung juga datanya tidak sinkron. Apalagi hal tersebut diketahui setelah mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Ini menandakan bahwa KPU tidak teliti,” pungkas Mita. •RDO





“Langkah itu juga untuk menghindari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan agar bisa dipergunakan sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu”

*Rahma Santhi Zinaida*



# INSTRUKSI KEJAGUNG TAK BERPENGARUH DI DAERAH

**Kejaksaan Agung menginstruksikan jajarannya untuk menunda seluruh proses pemeriksaan kepada calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, hingga calon kepala daerah jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.**

Keputusan itu disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam memorandumnya, Minggu, 20 Agustus 2023, untuk mencegah adanya indikasi kampanye hitam yang bisa menghambat para calon untuk mencoba peruntungan di Pemilu 2024.

Penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para caleg harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Selain untuk mengantisipasi keputusan tersebut, diharapkan agar para calon tidak merasa dipolitisasi hukum saat harus bertarung dalam persaingan mendapatkan kursi legislatif dan pemerintahan.

Caleg dari PDIP untuk Sumsel Dapil I, Tun Teja, mengatakan, aturan yang dibuat oleh sebuah lembaga terutama dari Kejaksaan pasti sudah melalui studi kasus yang panjang dan cermat.

“Selain itu, keputusan bisa memastikan siklus politik berjalan sebaiknya dan lancar agar kontestasi Pemilu 2024 bisa berjalan-lan-

car,” katanya.

Jika ada capres, caleg, atau calon kepala daerah yang terganjal dalam beberapa kasus, mulai dari menjadi saksi atau terduga pelaku, diharapkan bisa dilakukan proses hukum setelah Pemilu 2024 selesai digelar.

Sebenarnya, kata dia, di PDIP Sumsel sudah melakukan penyaringan bakal caleg dengan ketat, terutama harus yang bersih dari berbagai permasalahan hukum. Sehingga keputusan Kejaksaan itu tidak memberikan pengaruh besar pada pencalonan kader-kader PDIP Sumsel.

Wakil Ketua DPD PDIP Sumsel ini mengungkapkan, tidak hanya perkara permasalahan hukum, penyaringan kader-kader yang mencalonkan diri di Pemilu 2024 juga harus lulus tes kesehatan jasmani dan rohani. Ada banyak rangkaian tes dan tahapan yang dilakukan di internal partai.

“Kami bisa memastikan jika kader-kader yang maju dari PDIP Sumsel adalah orang-orang yang terbaik dari wilayahnya masing-masing. Jadi tidak terpengaruh dengan keputusan Kejaksaan itu. Karena kader PDIP Sumsel semuanya bebas dari masalah hukum sekecil apapun,” katanya.

Hal serupa disampaikan Wakil Sekretaris DPC Gerindra Ogan Ilir yang juga caleg Dapil II Sumsel, Melly Puspita. Dia berujar, dengan adanya keputusan Kejaksaan tersebut merupakan keputusan yang bijak agar mekanisme yang ada dalam Pileg, Pilpres ataupun Pilkada nanti tidak terganggu.

“Karena semakin lama, black campaign ini semakin banyak, terlebih ketika memasuki masa Pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.

Dia mengatakan, keputusan Kejaksaan dalam penundaan pemeriksaan tersebut menjadi langkah tepat untuk menghindari hal-hal yang akan mengganggu jalannya Pemilu 2024.

Apalagi dengan masifnya isu miring yang akan digiring untuk menjatuhkan calon-calon yang maju di Pemilu 2024, yang berpotensi membuat politisasi hukum. Keputusan itu juga membuat jalannya Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan lancar dan aman.

Pengamat Politik Sumsel, Febrian, berujar, ada peraturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang mengikat. Sehingga keputusan Kejaksaan itu harus dipertanyakan dulu kekuatan hukumnya seperti apa. Apakah keputusan Kejaksaan itu hanya mengikat secara internal atau sudah menyebar hingga ke luar Kejaksaan.

“Saya belum membaca persis apakah keputusan Kejaksaan sifatnya individual, berlaku atas nama orang-orang atau seperti apa. Kita bisa menganggap itu sebagai keputusan tata usaha negara,” katanya.

Tapi kalau menyangkut keseluruhan, dia pun sepakat jika keputusan tersebut berbentuk peraturan hukum, tidak pandang bulu dan semua bisa kena. Namun, jika isinya menunda, dia cenderung menilai jika itu adalah praktik hukum baru terhadap peraturan perundang-undangan.

Namun, dia juga mempertanyakan kenapa tidak KPU saja atau instansi di atasnya yang membuat keputusan penundaan pemeriksaan itu. Karena instansi tersebutlah yang merupakan penyelenggara Pemilu, bukan Kejaksaan-

ung.

“Kalau penundaan umum, bukan persis kewenangan Kejaksaan. Artinya terhadap kasus-kasus itu, mengadakan suatu peraturan hukum baru, menunda orang-orang tersebut. Harus dibaca persis, apakah menunda yang bersifat umum. Jika iya, kembalikan ke lembaga berwenang, Kejaksaan jangan sampai ikut campur,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) ini meminta agar jangan sampai keputusan Kejaksaan tersebut hanya untuk orang-orang tertentu. Apalagi saat ini banyak penetapan KPU dengan Daftar Calon Sementara (DCS) masih bermasalah.

Febrian juga mempertanyakan sejauh mana Kejaksaan dapat memahami orang-orang yang mencalonkan diri di Pemilu 2024. Jangan sampai Kejaksaan juga ikut serta menjadi instansi penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Jika keputusan tersebut direalisasikan, dia menilai penyelenggara pemilu sudah menundukkan diri terhadap keputusan itu dan akan menambah panjang Pekerjaan Rumah (PR) Kejaksaan.

Menurut akademisi dari Universitas Bina Darma (UBD) Palembang, Rahma Santhi Zinaida, tindakan Kejaksaan itu dinilai baik untuk mengantisipasi proses penegakan hukum yang digunakan sebagai alat politik praktis oleh pihak tertentu.

Hal tersebut perlu penanganan secara khusus, dengan tetap mengedepankan kecermatan dan kehati-hatian untuk mengantisipasi adanya indikasi tersebut, yang bersifat black campaign yang bisa menghalangi suksesnya Pemilu.

“Langkah itu juga untuk menghindari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan agar bisa dipergunakan sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Ilmu Komunikasi UBD Palembang ini menuturkan, masyarakat akan mengerti dan tidak akan berkurang kepercayaan kepada pemerintah dengan adanya putusan dari Kejaksaan tersebut.

Dia menilai, keputusan itu juga menjadi tolok ukur untuk melihat bagaimana kualitas dari para caleg dalam berkontestasi politik, tanpa ada hambatan dari pemeriksaan kasus-kasus yang menyeret nama caleg tersebut.

• RDR







“Mau ideologinya apa-pun, mau formulasinya seperti apa, yang penting adalah kemenangan”

Andries Lionardo

INFO  
PILEG

Minggu V • Agustus 2023

17

# PARTAI AGAMIS MASIH LAKU ASAL MAU BERSATU

**Persaingan partai Islam dan partai nasionalis dalam Pemilu 2024 diyakini akan semakin ketat. Apalagi sudah banyak partai politik yang mendeklarasikan diri untuk mendukung bakal calon presiden pilihannya.**

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari PDIP, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuat koalisi parpol pendukung ini kian kuat.

Rival kuat Ganjar Pranowo yakni Prabowo Subianto juga diusung oleh parpol besar lainnya, mulai dari Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Satu lagi bakal capres yang diusung oleh parpol besar adalah Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.

Di level Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), persaingan antar kader partai semakin ketat, baik partai Islam dan partai nasionalis.

Bakal caleg PBB, Syefri Yudha Putra, mengatakan dirinya akan maju untuk DPRD Sumsel melalui daerah pemilihan (Dapil) II Kota Palembang yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning, Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Alang-Alang Lebar.

Dia tidak gentar saat bersaing di bursa Pileg 2024 melawan kader-kader dari partai nasionalis lainnya. Karena dia berkeyakinan jika partai Islam di Indonesia masih terpatni di hati masyarakat.

Syefri berkeyakinan, pada 2024, masyarakat akan lebih antusias terhadap partai Islam daripada partai nasionalis. Sebab, Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam, sehingga dia optimistis partai Islam akan banyak dipilihnya pada Pemilu 2024.

“Karena saya melihat setiap kali saya melakukan

kunjungan serta melakukan sosialisasi ke masyarakat dan ke beberapa tempat, khususnya di dapil saya, masyarakat selalu antusias dengan kehadiran saya dan partai Islam, khususnya Partai Bulan Bintang,” katanya.

Dia juga tidak setuju jika partai-partai Islam di Indonesia disebut tertinggal dalam persaingan politik di Indonesia. Apalagi partai Islam disebut kurang memberikan kontribusi politik di Indonesia, sehingga Indonesia dikuasai partai nasionalis.

Menurutnya, pada pesta demokrasi mendatang, partai Islam terutama PBB masih mendapatkan dukungan. PBB bisa mendapatkan kursi yang lebih banyak dibanding partai nasionalis lainnya, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Pejabat di salah satu perusahaan farmasi di Sumsel ini juga memilih PBB karena keyakinannya yang sama dengan apa yang diusung oleh partai Islam ini. Bahkan, dia mendapatkan nomor urut 2 dari PBB di Daftar Calon Sementara (DCS) Pileg 2024.

“Jika saya terpilih, saya akan memperjuangkan pada aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Mengapa HAM? Karena saya menilai jauh dari kata adil dan merata. Saya juga akan memperjuangkan kesetaraan hukum, pemberdayaan Wanita, dan akan memperjuangkan hak-hak keluarga yang tidak mampu tanpa berbelit-belit, karena saya melihat untuk urusan masyarakat kecil semua urusan dipersulit,” ujarnya.

Yudi Fadhila, caleg DPR Partai Ummat juga berpendapat sama. Dia menilai umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, meskipun berasal dari berbagai suku. Sehingga, dukungan ke partai Islam tidak akan

kalah dengan partai-partai nasionalis lainnya.

“Islam adalah agama rahmatan lil alamin untuk semua manusia. Seharusnya partai dengan latar agama Islam, tidak sulit untuk maju, asal bersatu dan sesuai dengan tujuannya,” ujarnya.

Dia juga berharap semoga ke depan tidak ada kendala apapun saat kader-kader dari partai Islam meramaikan Pemilu 2024, baik di Pileg, Pilkada hingga Pilpres 2024.

Pengamat politik yang juga akademisi Universitas Sriwijaya (Unsri), Andries Lionardo, menilai, sudah banyak perkembangan demokrasi dan parpol di Indonesia. Menurutnya, partai-partai Islam di Indonesia sudah jarang melakukan koalisi dengan parpol lain. Sebab, prinsip dasar demokrasi dalam pemilihan itu tidak ada dalam konteks agama Islam, hanya di dalam konteks nasionalisasi untuk kepentingan bangsa.

“Mereka (partai Islam di Indonesia) seringkali berbeda dalam hal pilihan koalisi, jadi saya memprediksi hal-hal itu akan terjadi di 2024, walau cukup banyak partai Islam,” ujarnya.

Dia mencontohkan Partai Ummat yang merupakan pecahan dari PAN. Menurutnya, partai Islam tinggal memilih bagaimana memetakan koalisi atau menghadapi persaingan kontestasi partai-partai yang berbasis nasionalisme.

Dia menyebut, Anies Baswedan yang dikenal sebagai sosok yang agamis. N a -

mun, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mendapat dukungan dari partai nasionalis, seperti Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sehingga, branding religius tidak membatasi dukungan ke Anies Baswedan, karena yang terpenting adalah kemenangan dalam Pilpres 2024.

“Mau ideologinya apapun, mau formulasinya seperti apa, yang penting adalah kemenangan. Partai-partai Islam juga bisa ikut atau gabung dengan koalisi yang besar untuk memenangkan calonnya,” katanya.

Persaingan antar kader partai Islam dan partai nasionalis juga harus dipersiapkan dengan baik agar persaingan bisa seimbang, yakni dengan pelatihan dan manajemen yang baik.

“Tinggal bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih. Karena kita semakin dekat ke Pemilu 2024,” ucapnya.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banyuasin, Rudiyanto, mengungkapkan, partainya merupakan partai Islam yang lahir dari Nahdlatul Ulama (NU) dan berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dia pun tidak begitu khawatir dengan persaingan partai Islam dan partai nasionalis di Pemilu 2024. Sebab, dengan perkembangan yang ada, secara nasional PKB di ranking pertama dari partai-partai Islam lainnya di Indonesia.

Dia mengakui memang partai Islam terkesan tertinggal dengan partai nasionalis lainnya, seperti PDIP, Partai Golkar dan lainnya. Tapi dia melihat juga bahwa kesadaran masyarakat terhadap perkembangan partai Islam menggembirakan dan berkembang dari tahun ke tahun.

“Kalau kita lihat, kesadaran masyarakat terhadap partai Islam ini sudah tumbuh. Tapi banyak partai-partai Islam yang masih berdiri sendiri, masing-masing,” ucapnya.

Jika mengikuti parpol nasionalis lain yang sudah lama, Langkah PKB juga tidak terlalu jauh. Namun dia berkeinginan, partai-partai Islam di Indonesia bersatu dan bahu membahu serta bisa meyakinkan masyarakat untuk mendukung sepenuhnya.

Apapun namanya, yang terpenting partai Islam dan kadernya harus bisa membaur ke masyarakat. Jika tidak membuka diri ke masyarakat dan tidak sepenuhnya berbasis Islam, hal itulah yang membuat pamor partai Islam lebih lemah dibandingkan partai nasionalis lainnya.

“Untuk PKB di Kabupaten Banyuasin, target yang kita inginkan dari enam dapil, kita targetkan minimal 10 kursi Banyuasin. Insya Allah saya yakin di dapil itu, karena di setiap dapil kita posisikan caleg-caleg potensial,” ujarnya.

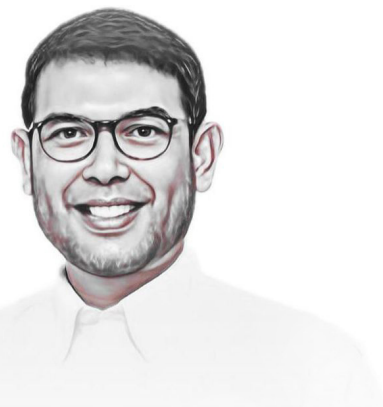
Rudiyanto pun turut mencalonkan diri sebagai caleg nomor urut 1 PKB untuk bisa melenggang meraih kursi DPRD Banyuasin di Dapil 6 dengan wilayah Kecamatan Talang Kelapa. Dia juga optimis bisa memenangkan Pileg 2024, apalagi sudah mendapatkan banyak dukungan dari pemilih pemula, terutama di generasi anak muda. ●RDR





“Seharusnya begitu, di sini (DPR) sudah mentok, akhirnya mereka masuk ke MK, itu enggak bagus dalam pandangan saya”

Nasir Djamil



# PEMBAHASAN BATAS USIA CAPRES KEMBALIKAN KE DPR SAJA

**Gugatan terkait batas usia minimal dan maksimal calon presiden dan wakil presiden yang saat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kini tengah jadi sorotan publik. Upaya gugatan tersebut dinilai bisa menjadi penjegal dan pemulus jalan untuk kandidat tertentu di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.**

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, sepakat mengembalikan pembahasan regulasi batas usia capres dan cawapres ke DPR. Menurutnya, di DPR pembahasan akan dilakukan secara lebih komprehensif lantaran memiliki fungsi sebagai lembaga legislasi atau pembuat undang-undang.

“Kembalikan pada DPR saja. Itu wewenang pembuat Undang-Undang,” tegas Mardani, Rabu, 23 Agustus 2023.

Politisi Fraksi PKS ini meminta agar MK tidak membuat norma hukum atas kesimpulan uji materi sebuah undang-undang.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin, menilai, mencari capres dan cawapres yang terbaik bukanlah dinilai dari perkara usia.

“Apakah kompetensi, kredibilitas seseorang secara absolut berkaitan dengan umur? Kan itu harus dijawab. Soal presiden itu bukan soal umur, tapi soal kompetensi,” kata Yanuar.

Menurutnya, usia bukanlah batasan bagi seseorang untuk bersaing di dalam pemilu, melainkan soal integritas.

“Karena begini, boleh jadi usianya sangat muda ternyata kompetensi, integritas,

kemampuannya jauh lebih bagus, ketimbang orang yang usianya lebih tua. Sudah tua atau di atas usia pensiun, itu terus dipandang tidak memiliki kemampuan, nah itu saja sudah menunjukkan kita ada masalah dalam memahami duduk perkara,” ujarnya.

Ketua DPP PKS, Nasir Djamil, menicium adanya upaya endorsement dan pengembosan oleh pihak-pihak tertentu berkaitan dengan gugatan batas minimal dan maksimal usia capres dan cawapres.

Sebab, dari gugatan usia capres-cawapres minimal 35 tahun dan maksimal 70 tahun, ditengarai sarat kepentingan politik jangka pendek Pilpres 2024. Itu karena ada kandidat bakal capres usianya lebih dari 70 tahun dan santer dikabarkan ada calon yang digadang-gadang menjadi bakal cawapres namun usianya masih 35 tahun.

“Jadi, memang ini kalau dilihat secara sekilas ini seperti menggembos dan mengendorse. Dua (gugatan) yang muncul di MK itu menunjukkan yang satu menggembos, yang satu mengendorse,” kata Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.

Dia menyayangkan pihak-pihak itu justru menggugat batas usia capres-cawapres di MK, bukan mengusulkan perubahannya di DPR ketika UU Pemilu dirumuskan.

Nasir menyebut, lebih baik usulan batas usia capres-cawapres itu dirumuskan di DPR meski pembahasannya akan alot karena banyak pihak berkepentingan di parlemen.

“Seharusnya begitu, di sini (DPR) sudah mentok, akhirnya mereka masuk ke MK, itu enggak bagus dalam pandangan saya,” ujarnya.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies, Juhaidy Rizaldy, juga menilai soal gugatan usia capres-cawapres di MK kurang tepat.

Menurut Juhaidy, presiden tidak sama dengan jabatan lainnya. “Jabatan Presiden tidak sama dengan jabatan negara lainnya, yang dibandingkan oleh para pemohon, seperti jabatan di BPK, MA, MK. Presiden

itu dipilih langsung oleh rakyat, sovereignty dari rakyat,” kata Juhaidy.

Ia menambahkan jika jabatan lainnya diperoleh dari hasil seleksi dari panitia seleksi, uji kelayakan DPR dan dilantik oleh presiden.

“Konstitusi tidak mengatur secara rigid soal usia capres-cawapres, tapi dalam perjalanan pilpres, kita pernah usia minimal 35 tahun capres-cawapres dalam UU 42/2008 dan ketentuan ini dipakai saat Pemilu dan Pilpres 2014,” jelasnya.

Juhaidy juga menyinggung di negara lain juga tak ada batas maksimal calon pemimpin negara. “Jika lihat perbandingan di negara lain adanya usia minimal dan tidak ada usia maksimum, seperti Kroasia 18 tahun, Prancis 19 tahun, Brasil 35 tahun, Amerika Serikat 35 tahun,” jelas Juhaidy.

•RDO



## Pelantikan Kepala Daerah Waktunya Belum Diatur

DPR bersama pemerintah telah membicarakan perlunya aturan untuk mengatur rentang waktu pelantikan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Anggota Komisi II DPR, Guspardy Gaus, mengatakan, dalam UU

10/2016 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota hanya mengatur mengenai waktu Pilkada Serentak pada November 2024. Namun, dalam hal itu tak mengatur keserentakan pelantikan hasil pilkada.

“Kami sudah sampaikan kepada Mendagri, bagaimana disamping keserentakan pelaksanaan dari pada pilkada, juga ada aturan yang mengatur tentang rentang waktu pelantikan. Jadi, bukan keserentakan pelantikan, rentang waktu paling lama pelantikan itu harus dibatasi,” kata Guspardy, Rabu, 23 Agustus 2023.

Politisi Fraksi PAN mengatakan, Komisi II DPR bersama pemerintah

berkomitmen mencegah lamanya penjabat kepala daerah menjabat. Sebab itu, aturan yang akan dibuat bakal membatasi agar waktu pelantikan kepala daerah tak begitu lama.

“Kami sudah sampaikan itu bagian dari pembicaraan bagaimana menata pelaksanaan pilkada, bagaimana pula penataan pelaksanaan terhadap pelantikan agar keserentakan itu jangan nanti menimbulkan jarak yang panjang,” ucap legislator Dapil Sumatera Barat II ini.

Terkait adanya potensi pihak yang akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Guspardy menjelaskan bahwa DPR bersama Kementerian Dalam Negeri akan melakukan konsultasi kepada

MK. Konsultasi itu berupa membuat aturan main agar tak semua gugatan atau sengketa hasil pilkada dapat diproses di MK.

“Pemerintah bersama DPR akan mengkonsultasikan masalah ini kepada MK, perlu dibuat aturan main apa yang boleh diajukan gugatan ke MK mana yang tidak,” kata Guspardy.

“Dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh MK, tentu berdampak pada penyelesaian sengketa itu bisa dipercepat. Dengan bisa dipercepat rentang waktu daripada paling lambat pelantikan pilkada itu bisa diejawantahkan lewat Permendagri atau Surat Edaran dari pak menteri,” tandasnya. •RDO







“Menjelang kampanye, kami akan membentuk Relawan Demokrasi yang bertugas di desa-desa”

Hepriyadi

# UANG POLITIK SEDIKIT BANYAK PEMILIH GOLPUT

**Fenomena golongan putih atau golput di kalangan masyarakat merupakan hal biasa dalam sebuah demokrasi. Hanya saja, prinsip golput di Indonesia berbeda dengan negara lain seperti Amerika dan Eropa.**

**U**paya pemerintah meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi masih terus dilakukan dengan melakukan sosialisasi. Hingga saat ini, peran serta masyarakat dalam berdemokrasi mencapai 77,5 persen. Jumlah partisipasi tersebut masih tergolong tinggi dibanding Amerika dan Eropa yang mencapai 60 persen.

Di Sumatera Selatan, data pemilih golput ada di angka 6,23 persen atau sekitar 943.701 orang dari seluruh 17 kabupaten/kota pada Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu Sumsel, Massuryati, menjelaskan, langkah yang diambil untuk menekan angka golput di Sumsel salah satunya dengan menyosialisasikan proses Pemilu.

“Karena pemilih ini adalah salah satu elemen dari proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi ada tiga elemen penting pada proses pemilu. Pertama pemilih, kedua penyelenggara, ketiga peserta pemilu,” kata Koordinator Divisi pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel ini.

Menurutnya, ketika masyarakat Sumsel tidak menggunakan hak kedaulatan yang ada di tangannya, hal tersebut menjadi hak mutlak. Bawaslu Sumsel terus mencoba menyadarkan pemilih, jika ikut dalam pen-

coblosan menjadi hal penting dan merupakan hak tertinggi bagi pemilih, hak penuh kedaulatan.

Mereka berharap pemilih tidak melakukan golput dan datang ke TPS. Untuk itu, mereka terus melakukan kegiatan-kegiatan akselerasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dia menjelaskan, secara empirik, ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilih itu tidak datang ke TPS. Di antaranya sakit saat hari pemungutan suara, kandidat calon yang dipasang atau yang dicalonkan tidak sesuai dengan hati nurani pemilih. Lalu, di hari pemungutan suara, pemilih ada urusan keluarga seperti kondangan atau saudara yang meninggal dunia serta pemilih tidak masuk dalam daftar pemilih.

“Mungkin juga ada karena pengalaman pribadi bagi pemilih itu, siapapun presidennya, siapapun DPR-nya, pemilih tetap saja seperti itu. Pemilih punya anggapan seperti itu, ada yang saya temukan di masyarakat, mengakibatkan pemilih itu antipati pada hari pemungutan suara untuk datang ke TPS. Ya tidak ada gunanya juga siapa jadi presiden juga sama seperti itu,” ucapnya.

Dia mengatakan, hal ini mungkin menjadi penyebab pemilih tidak datang ke TPS. Namun, di Sumsel hampir rata-rata tidak begitu tinggi yang tidak menggunakan hak pilih.

“Kalau di Sumatera Selatan, ini kalau secara data saya belum cek secara detail ya. Namun secara umum, Sumsel data pemilih golput itu cuma di angka 6,23 persen dari seluruh 17 kabupaten/kota pada pemilu 2019, dan berdasarkan angkan-nya sekitar 943.701. Lebih kurang data yang ada di KPU yang saya lihat,” terangnya.

Di Sumsel, angka tertinggi pemilih golput ada di Kabupaten Banyuasin yang berdasarkan data Pemilu 2019, pemilihan anggota DPD dan anggota DPRD menyentuh angka 116.653 pemilih.

dari 593.746 jumlah terdaftar.

Menurut Massuryati, untuk mengurangi angka golput, mereka akan memainkan dan menyebarluaskan melalui media sosial. Sebab, media sosial adalah media yang paling mudah diterima oleh masyarakat.

“Jadi media sosial ini adalah alat yang juga efektif dalam proses kita menginformasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menekan angka golput di Sumsel. Bawaslu juga akan menggunakan sistem media-media untuk mengantisipasi, jangan sampai pemilih itu menjadi golput,” ujarnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumsel, Hepriyadi, menjelaskan, untuk menekan angka golput, mereka telah melakukan sosialisasi.

Menurut Hepriyadi, banyak faktor yang membuat pemilih memilih untuk golput. Di antaranya karena alasan teknis administrasi pada kepemiluan, seperti nama yang bersangkutan tidak terdaftar pada DPT, sehingga tidak mendapatkan surat undangan untuk mencoblos, tidak mendapatkan sosialisasi kepemiluan.

Hal itu menjadi salah satu tugas KPU untuk memberikan fasilitas. Artinya berkaitan dengan DPT mereka memastikan bahwa semua masyarakat terdaftar dan dilakukan sampai sekarang. Bahkan, setelah ditetapkan DPT, pihaknya membuka peluang masyarakat yang ingin mencoblos dari daerah lain.

“Sekarang sedang dilakukan pendataan. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi terkait pemilih tambahan untuk mereka yang sudah memiliki KTP, namun ketika hari pencoblosan tidak terdaftar di DPT, maka mereka bisa mencoblos di tempat alamat sesuai dengan KTP-nya,” terangnya.

Dia menambahkan, alasan masyarakat melakukan golput juga karena merasa kecewa dengan pilihan politiknya dan itu membutuhkan proses penyadaran. Memang, proses tersebut tidak bisa berjalan dengan cepat, namun harus dilakukan terus-me-

nerus karena suara mereka penting dalam Pemilu.

Terkait langkah KPU untuk mengatasi permasalahan dan menekan angka golput pada Pemilu 2024, mereka juga akan menggalakannya melalui media sosial. Bahkan, mereka sudah memulai sebelum tahapan pemilu dan membentuk kelas demokrasi yang dibuka di 17 kabupaten/kota.

KPU juga menyelenggarakan Desa Peduli Pemilihan sebagai wahana sosialisasi untuk menekan angka golput.

“Ke depan akan terus dilakukan dan menjelang kampanye kami akan membentuk Relawan Demokrasi yang bertugas di desa-desa dan akan kami libatkan dari berbagai elemen seperti pemuda, perempuan, pemilih disabile,” ujarnya.

“Untuk menekan angka golput di tingkat pemilih pemula, kami juga gencar berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. Ada yang kami datangi langsung seperti SMA Methodist, SMA N 1, dan SMAN 9, karena potensi pemilih pemula banyak di masa SMA,” ungkapnya.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Sriwijaya, Ardiyan Saptawan, menyebut, ada perbedaan prinsip antara pelaku golput di Indonesia dengan luar negeri.

Di luar negeri, mereka yang melakukan golput karena siapapun pemimpinnya yang terpilih kondisinya tetap sama. Tidak ada perubahan yang signifikan.

Sementara di Indonesia, mereka yang melakukan golput karena beberapa faktor. Antara lain karena kecewa dengan pemimpin yang mereka pilih selama ini, faktor ekonomi, dan faktor transportasi.

Mereka yang merasa kecewa dan akhirnya golput biasanya ada di perkotaan. Sehingga lebih memilih menikmati hari libur Pemilu daripada pergi ke TPS karena hasilnya tetap saja mengecewakan.

Untuk faktor ekonomi, hal ini banyak dilakukan masyarakat dan menjadi alasan utama mereka untuk menjadi golput.

“Mereka yang bekerja sebagai petani, buruh atau pekerja harian lebih memilih pergi bekerja daripada ke TPS. Faktor lain karena tidak ada yang mendatangi mereka untuk mengakomodirnya. Artinya kita bicara soal politik uang. Hal ini sudah hampir menjadi kebiasaan di politik kita,” ungkap Dosen FISIP Unsri ini.

Sementara faktor transportasi, mereka yang biasanya tinggal di kebun-kebun malas untuk datang ke TPS karena lokasinya cukup jauh. Kondisi ini banyak terjadi di daerah seperti Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas dan Muratara.

“Namun di Pemilu 2024 ini saya yakin jumlah golput akan terus berkurang. Banyak peserta Pemilu yang ikut berkompetisi membuat mereka tentu saling bersaing untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Hal ini tentu bisa mengurangi suara Golput,” ucapnya.

• RDR





“Instruksi Jaksa Agung ini adalah tindakan cermat, hati-hati, dan profesional yang mestinya dijalankan jajaran Adhyaksa”

Barita Simanjuntak



# KPK JALAN TERUS, KEJAGUNG PILIH HATI-HATI

**Penanganan perkara korupsi jelang Pemilu 2024 bakal menjadi sorotan publik. Apalagi, aparat penegak hukum punya sikap berbeda soal kasus-kasus yang diduga melibatkan para calon presiden, calon wakil presiden hingga calon kepala daerah.**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penanganan perkara korupsi oleh jajarannya tidak akan terpengaruh pada pelaksanaan Pemilu 2024.

“KPK ada amanat dari undang-undang untuk terus melakukan pemberantasan korupsi, sehingga tentu kami lakukan sesuai ketentuan dengan prosedur hukum yang berlaku,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.

Ali menambahkan, penanganan perkara korupsi oleh lembaga antirasuah akan dilaksanakan secara profesional dan proporsional.

Dia juga memastikan KPK dalam selalu independen dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun.

KPK juga akan selalu berpegang pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, proporsional, menghormati hak asasi manusia dan sebagainya.

“Itu yang menjadi pegangan kami ketika menerima pengaduan masyarakat, memverifikasinya, kemudian menindaklanjuti pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan,” ujar Ali.

Sikap KPK tersebut sedikit berbeda dengan Kejaksaan Agung yang menginstruksikan kepada jajaran jaksa untuk menunda pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap para calon peserta pemilu sejak resmi ditetapkan sebagai calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah sampai seluruh rangkaian proses tahapan pemilihan selesai.

Kepala Pusat Penanganan Hukum (Kapuspenkum)



Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menegaskan, instruksi tersebut bukan untuk menghentikan penuntasan perkara korupsi, tetapi untuk melindungi sementara jaksa maupun institusi Kejaksaan dijadikan sebagai terpeleceh atau menjadi black campaign.

“Justru kami tidak mau menjadi terpeleceh, menjadi black campaign,” kata Ketut.

Kejagung sudah memberikan arahan kepada jaksa di daerah untuk cermat dalam penanganan perkara korupsi menjelang Pemilu 2024 agar tidak berpolemik.

“Kami sudah memberikan arahan kepada daerah tidak akan menimbulkan polemik,” ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan jajaran jaksa, terutama yang bertugas bidang intelijen dan tindak pidana khusus, untuk cermat dan berhati-hati saat menerima dan menangani aduan korupsi yang melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam instruksi yang sama, Burhanuddin juga meminta jaksa berhati-hati menerima dan menangani laporan dugaan korupsi yang melibatkan calon anggota legislatif dan calon kepala daerah demi mengantisipasi adanya black campaign kepada mereka menjelang dan selama tahapan Pemilu 2024.

Jaksa Agung menjelaskan, memasuki

tahun politik institusi Kejaksaan rawan menjadi alat yang dipergunakan untuk menyering calon-calon tertentu. Oleh karena itu, dia kembali menegaskan perlunya kehati-hatian mencegah ada kampanye hitam terselubung. Jaksa Agung juga mengingatkan jajarannya Kejaksaan netral dan tidak memihak salah satu calon.

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita Simanjuntak, menilai Kejaksaan Agung sudah cermat mengeluarkan imbauan kepada jajaran jaksa untuk hati-hati dalam menangani perkara terkait korupsi menjelang Pemilu 2024.

“Saya kira ini adalah langkah bijaksana dalam rangka menjaga dan mengamankan agenda konstitusi bangsa. Instruksi Jaksa Agung ini adalah tindakan cermat, hati-hati, dan profesional yang mestinya dijalankan jajaran Adhyaksa untuk menjaga netralitas aparat Kejaksaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang,” ujarnya.

Barita menilai, kebijakan itu tidak akan menghentikan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di wilayah Indonesia, termasuk pelaku korupsi yang berasal dari kalangan partai politik.

Karena, esensi penegakan hukum tidak hanya persoalan penindakan bersifat represif maupun penyidikan projusticia, tetapi termasuk penyelidikan, investigasi, data, bahan-bahan pencegahan, dan pendampingan yang dapat dilakukan secara senyap, sehingga suasana menjelang, saat, dan setelah agenda pemilu dapat berjalan kondusif, aman, dan terkendali.

“Jadi bukan menghentikan, tetapi menunda untuk mengawal pesta demokrasi bangsa kita,” kata Barita. ●RDO

## Bakal Caleg Perindo Jadi Tersangka

Kejaksaan Agung memang menginstruksikan menunda pemeriksaan terhadap para calon peserta Pemilu 2024. Namun, ada pula yang proses hukumnya tetap dilanjutkan karena sudah berlangsung. Salah satunya kasus dugaan korupsi pencairan deposito dan uang hibah dari Pemprov Sumsel untuk KONI Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menetapkan dua orang tersangka, yakni Suparman Romans selaku Sekretaris KONI Sumsel 2021 dan Ahmad Tahir selaku Ketua Harian KONI periode Januari 2020 hingga April 2022.

Suparman Romans sendiri diketahui masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) Partai Perindo dengan nomor urut 2. Dia maju sebagai bakal caleg DPRD Kota Palembang Dapi 3 yang meliputi Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II dan Ilir Timur III.

Suparman Romans dan Ahmad Tahir ditetapkan tersangka Kejati Sumsel dengan modus melakukan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban, namun kegiatannya fiktif.

Kedua tersangka terbukti telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah terkait pencairan deposito serta pengadaan barang yang bersumber dari APBD Sumsel 2021. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp5 miliar.

Kasi A Bidang Intelijen Kejati Sumsel, Vanny Yulia, mengatakan, kedua tersangka dilakukan penahanan di Rutan kelas IA Pakjo Palembang untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai 24 Agustus hingga 12 September 2023. Mereka ditahan di rutan dengan pertimbangan dan berdasarkan pasal 21 Ayat (1) KUHP yang dikhawatirkan dapat melarikan diri kemudian menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Menanggapi kasus hukum tersebut, Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman, langsung mengambil langkah tegas dengan melakukan pemecatan terhadap Suparman Romans sebagai bakal caleg Partai Perindo.

Terkait instruksi Kejagung yang akan menghentikan sementara pemeriksaan terhadap peserta Pemilu 2024, Febuar Rahman

menilai hal itu berbeda nuansanya. Sebab, proses pemeriksaan terhadap Suparman Romans sudah dilakukan sebelum ada keputusan dari Kejagung.

“Yah betul dia (Suparman Romans) bacaleg kita dari Partai Perindo dan kita ganti. Apalagi dia kan bukan pengurus, bukan kader, hanya berstatus anggota calon legislatif,” kata Febuar Rahman.

Pemecatan itu, lanjut Febuar, memang sudah seharusnya dilakukan saat DCS ini karena masuk dalam masa pencermatan dan masa keberatan. Sehingga kalau ada yang mendapat masalah hukum harus diganti secepatnya.

Hal itu juga akan merugikan partai jika masih dipertahankan. Selain harus konsentrasi sebagai peserta Pemilu, yang bersangkutan juga konsentrasi dengan masalah hukumnya.

“Selain itu dapat merugikan dan merusak nama baik partai,” tegas Febuar Rahman. ●RHD







“Haram hukumnya Partai Buruh berkoalisi dengan partai politik di Senayan yang mengesahkan Omnibus Law”

Said Iqbal

# PARTAI BURUH HARAMKAN KOALISI PARPOL KONTRAK POLITIK HANYA DENGAN CAPRES

**Partai Buruh memiliki konstituen yang cukup besar. Target pemilih partai dengan ciri khas oranye itu didominasi oleh buruh. Secara kalkulasi, mereka menargetkan setidaknya 20 juta suara sah di Pemilu 2024.**

Tidak hanya itu, dengan jumlah buruh yang begitu banyak di seluruh Indonesia, membuat Partai Buruh banyak dilirik oleh partai-partai lain, terutama yang ingin bertarung di Pilpres 2024.

Kandidat itu sangat membutuhkan suara, terutama lumbung suara dari barisan buruh. Dalam hal ini, Partai Buruh tentu memiliki bargaining politik di Pilpres cukup besar.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menentukan sikap politiknya di 2024. Dalam perjalanannya, Partai Buruh sudah memiliki beberapa kandidat calon presiden (capres) yang nantinya bakal didukung di Pilpres 2024.

Jika ingin mengetahui sikap politik Partai Buruh di 2024, Info Indonesia mewawancarai Said Iqbal secara eksklusif dan merangkumnya untuk para pembaca setia. Berikut wawancara Info Indonesia dengan Said Iqbal:

**Tahapan pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden tinggal menghitung bulan. Meskipun bukan partai parlemen, apakah Partai Buruh sudah menentukan sikap politik atau memberikan dukungan ke calon tertentu?**

Yang pertama partai buruh punya mekanisme dalam menentukan calon presiden yang akan dipilih. Ada tiga tahapan yang akan dilalui untuk menentukan calon presiden partai: Pertama, Rapat Kerja Nasional (Rakernas); Kedua, konvensi; dan Ketiga Rapat Presidium.

**Mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana mekanisme pada tahapan Rakernas dalam menjaring kandidat capres yang akan Partai Buruh dukung di 2024.**

Rapat Kerja Nasional itu sudah dilakukan pada Februari 2023. Muncul empat nama dan belakangan pasca Rakernas menyusul satu nama yang diusulkan oleh delapan provinsi.

Pasca Rakernas itu masih diperbolehkan untuk memberikan masukan atau usulan, dan muncul satu nama.

**Siapa saja figur-figur capres yang muncul pada saat Rakernas tahun lalu?**

Jadi ada lima nama. Pertama adalah Prabowo Subianto. Kedua Ganjar Pranowo. Ketiga Said Iqbal. Keempat Anies Baswedan. Kelima Najwa Shihab.

Dalam konfigurasi ini, Partai Buruh itu ada dua orang calon alternatif. Jika Presidential Threshold diubah menjadi 0 persen, kami memungkinkan untuk maju alternatif ya. Setidaknya Mbak Najwa Shihab, nama yang menguat juga di Partai Buruh.

**Berarti ini sudah ada lima kandidat calon presiden. Tiga hasil dari usulan kader Partai Buruh di seluruh Indonesia dan dua kandidat merupakan calon alternatif. Apakah akan disaring kembali?**

Dari Rakernas ini, kami akan diputuskan oleh Exco yang ada di 38 Provinsi, ada 487 Exco Kabupaten/Kota. Mereka yang memutuskan aspirasi di bawah bawa di Rakernas, ditambah satu orang menyusul pasca Rakernas dari delapan provinsi mengusulkan.

Dari lima nama ini nanti akan dibawa di konvensi calon presiden Partai Buruh.

**Kandidat calon presiden yang sudah diusulkan itu akan diputuskan di konvensi? Mungkin Anda bisa menjadi terkait mekanisme tahap konvensi ini dalam menjaring calon presiden yang akan Partai Buruh dukung di 2024.**

Apa itu konvensi? Kita akan undang 10 Guru Besar dari 10 Universitas ternama di Indonesia. Mereka akan mengajukan semacam ‘debat terbuka’ dengan calon-calon presiden. Itu kita undang baik melalui zoom atau datang langsung.

**Setelah melaksanakan konvensi terhadap calon presiden tersebut, apakah akan ada tahap selanjutnya sebelum memutuskan satu kandidat calon presiden?**

Selain 10 Guru Besar yang akan berdebat dialog, debat akan dilakukan dalam konvensi calon presiden itu, kami akan melakukan referendum dengan skala kecil.

**Refedum ini untuk apa? Apakah ini mekanisme terakhir dalam menentukan calon presiden yang bakal dukung Partai Buruh? Mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit mengenai hal ini.**

Partai Buruh itu enggak perlu survei, anggota kita kurang lebih 10 juta. Cukup pakai WhatsApp saja. Anggota kita ini kan tercatat, alamatnya tercatat.

Kita tanya saja melalui WA, di antara lima nama calon presiden ini, siapa yang menurut Anda layak dipilih. Setelah terpilih disaring 2-3 calon presiden tersebut. Hasilnya dibawa namanya ke rapat presidium.

**Artinya, dalam rapat Presidium itu bakal ditentukan satu calon presiden yang akan didukung Partai Buruh?**

Rapat Presidium ini dari 11 organisasi inisiator Partai Buruh. Di situ diputuskan satu calon presiden terpilih.

**Tahapan Pemilu 2024 ini terus berjalan. Apakah waktunya mencukupi untuk menjaring nama-nama tersebut. Yang kita tahu, Pemilu 2024 ini waktunya sangat mepet.**

Mungkin sekitar Oktober atau awal November baru kita tahu hasil rapat Presidium. Sekitar September, Oktober, November sudah kelihatan hasilnya. Itulah calon presiden Partai Buruh.

**Setelah mendapatkan calon satu nama, berarti Partai Buruh akan berkoalisi dengan partai politik pengu-sung calon tersebut?**

Se-maksimal mungkin akan melakukan koalisi dengan calon presiden secara personal.

**Berarti tidak berkoalisi dengan partai politik pengusung calon tersebut? Mengapa?**

Karena Partai Buruh tidak mungkin atau haram, bahasa saya itu tidak mungkin atau haram hukumnya Partai Buruh berkoalisi dengan partai politik di Senayan yang mengesahkan Omnibus Law.

Enggak mungkin karena Partai Buruh itu dihidupkan kembali karena Omnibus Law enggak mungkin kita berkoalisi.

Dengan demikian, Partai Buruh tidak mungkin akan jadi tim sukses yang didaftarkan di KPU. Enggak mungkin, karena kita enggak mungkin bersatu dengan partai politik pengesah Omnibus Law.

**Berarti bagaimana mekanisme koalisi yang akan dibangun oleh Partai Buruh dan calon presiden tersebut?**

Modelnya kami akan berkontrak politik dengan calon presiden yang nanti diputuskan di konvensi dan terakhir di rapat presidium. Jadi kita kontrak politik apa aja? Poin-poin itu nanti kita diskusikan.

**Terlepas dari itu, apakah Anda pernah bertemu atau berkomunikasi dengan para calon presiden yang diusulkan oleh para kader Anda selama ini?**

Kalau secara khusus untuk mendiskusikan capres, tidak ada satu pun ya. Tapi kalau sifatnya komunikasi politik, diskusi tentang isu Omnibus Law sudah. Dengan Pak Ganjar kita diskusi tentang Omnibus Law, dengan harapan kalau Pak Ganjar jadi presiden, Omnibus Law tolong dipertimbangkan direvisi.

**Terakhir, sebenarnya apa yang Anda harapkan di 2024 terhadap Partai Buruh?**

Jika Partai Buruh masuk Parlemen, di DPR akan terjadi keseimbangan pertarungan. DPR itu kan pengawas, legislasi, dan pengawas anggaran.

Nah, di anggaran, kita akan berimbang. Misalnya, lo boleh ambil infrastruktur, tapi kami minta kalau memang nanti di klaster ketenagakerjaan setidaknya-tidaknya ada persoalan yang merugikan buruh bisa didiskusikan.

Investasi juga kalau bisa diberikan ruang gerak yang lebih fleksibel ya, yang ramah investasi, itu bikin perizinan tidak berlarut. Itu kan bagus ya, setuju-setuju aja. •RDO





“PDIP dan PPP ini tetangga. Sejak lahir dulu tetangga, PPP sebelah kanan, PDI sebelah kiri. Ya kalau enggak equal pasti berantem setiap hari”

**Muhammad Mardiono**



# SANDIAGA TAK JADI WAPRES PPP - PDIP TETAP MESRA

**Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menampik kabar isu yang telah beredar mengenai retaknya hubungan komunikasi dengan PDIP menjelang Pilpres 2024, khususnya dalam penentuan calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo.**

Kabar keretakan hubungan itu muncul ke permukaan berawal dari komentar Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, yang mempersilakan PPP keluar dari koalisi jika memaksakan Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Pernyataan itu muncul lantaran sebelumnya PPP ditengarai terus mewanti-wanti akan keluar dari koalisi jika sosok Sandiaga Uno tak terpilih untuk diusung menjadi cawapres mendampingi Ganjar.

Basarah menilai, apabila PPP tetap memaksakan kehendak untuk mendorong Sandiaga Uno menjadi cawapres, maka PDIP mempersilakan keluar dari koalisi. Sebab, selama ini PDIP dalam rangka membangun kerja sama politik selalu mengedepankan prinsip kesukarelaan.

Menyikapi hal itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menepis kabar keretakan hubungan dengan PDIP. Saat ini, hubungan PPP dan partai yang dinakhodai Megawati Soekarnoputri itu tidak ada masalah dan seimbang dalam mengawal Pilpres 2024.

Mardiono menyebut, hubungan PPP dan PDIP bukan sekadar kawan politis belaka, melainkan sudah seperti saudara yang memiliki kedekatan emosional.

“Hubungan PPP dan PDI equal (seimbang). Jadi sangat equal, PDIP dan PPP ini tetangga. Sejak lahir dulu tetangga, PPP sebelah kanan PDI sebelah kiri.”

Ya kalau enggak equal pasti berantem setiap hari,” ungkap Mardiono.

Mardiono mengungkapkan, dengan hubungan kedekatan emosional yang sudah terbangun sejak lama, maka secara otomatis dalam membangun kerja sama politik, baik PPP maupun PDIP, pastinya didasari dengan ketulusan dan kesukarelaan.

Mardiono menegaskan, pada prinsipnya partai berlambang Ka'bah itu akan tetap konsisten mengedepankan dialog dalam kerja sama politik dengan PDIP, termasuk dalam menentukan sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Mardiono menambahkan, prinsip mengedepankan dialog itu dilakukan sebagai bentuk manifestasi ketulusan dan kesukarelaan PPP dalam rangka membangun kerja sama politik jelang pesta demokrasi tahun depan.

“Jadi kita sudah tentu enggak ada masalah (PDIP) dengan kami. Secara politik, sejak kami mengumumkan kerja sama politik itu sampai sekarang, tetap harmonis tidak ada persoalan apapun karena kerja sama politik itu didasari kepada ketulusan,” ungkap Mardiono.

“Jadi kita ingin hasil dari Pemilu 2024 ini adalah menghasilkan sebuah pemimpin yang betul-betul, sekali lagi bisa menjawab tantangan untuk Indonesia ke depan,” sambungnya.

Keputusan PPP menjalin kerja sama dengan PDIP juga didasari atas keinginan seluruh elit dan kader yang menginginkan sosok pemimpin masa depan yang dekat dengan rakyat. Hal itu, menurut Mardiono, yang melatarbelakangi PPP resmi memutuskan untuk berga-

bung dengan PDIP dalam mengusung Ganjar Pranowo menjadi bakal capres 2024.

Mardiono menilai, Ganjar adalah seorang pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat dan memiliki kredibilitas serta kemampuan dalam rangka menanggulangi permasalahan yang saat ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

“Juga betul-betul pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Jadi itu yang kami inginkan, gitu. Jadi ketulusan itu yang lahir dalam rangka melahirkan kepemimpinan itu,” ujar Mardiono.

Mardiono menegaskan, pihaknya saat ini tidak ngoyo ataupun egois dalam rangka mengusung sosok Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

Hal itu lantaran, baik PDIP ataupun PPP, sama-sama memiliki karakter dan sikap kedewasaan dalam berpolitik karena telah lama menjadi partai yang berpengalaman dalam mengarungi dinamika politik nasional.

“Jadi kita tidak ada mengedepankan egois ‘oh ini orangnya harus ini, harus orangnya ini, harus orangnya itu’. PPP dan PDIP tidak seperti itu,” terang Mardiono.

Selain meluruskan kabar miring terkait hubungannya dengan PDIP, Mardiono juga turut mengomentari sosok Megawati Soekarnoputri. Dia menilai, sosok putri Presiden Soekarno itu selama memimpin telah berhasil membawa kapalnya sebagai partai politik yang memiliki kader-kader hebat di arena politik Indonesia.

Selain itu, menurut Mardiono, Megawati adalah sosok pemimpin yang memiliki jiwa negarawan yang dukup matang dalam menentukan arah dan kebijakan politis bagi partai politik yang dia pimpin.

“Bu Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP saya pikir beliau adalah seorang negarawan yang cukup matang, di mana saya contohkan yang tadi, beliau tidak memaksakan kehendak pada akhir mencalonkan pak Joko Widodo pada Pemilu 2024 dan menang,” ungkapnya.

Mardiono menjelaskan, hal itu dapat dilihat dari Pemilu 2014, di mana saat itu PDIP malah mengusung Joko Widodo menjadi capres. Padahal, di satu sisi, sosok Mega masih memiliki potensi untuk maju bersaing dalam konstelasi Pilpres saat itu.

“Jadi saat itu mungkin agak sulit karena kita dikeroyok, saya termasuk tidak mendukung, PPP termasuk yang tidak mendukung. Saat itu, PDIP kemudian NasDem dengan PKB dikeroyok banyak partai, termasuk PPP. Tapi ternyata rakyat memiliki jawaban, kemenangan ada di tangan rakyat,” tutur Mardiono.

Berdasarkan hal itu, Mardiono mengaku telah mencermati dan memperhatikan strategi politik PDIP lantaran berhasil memenangkan sosok Joko Widodo maju menjadi Presiden Indonesia 2014.

“Jadi itu semua maka kami mendengarkan suara-suara rakyat. Siapa sih yang kira-kira diinginkan benar-benar oleh rakyat,” kata Mardiono.

“Nah, sampai sekarang ini kita masih terbuka mendengarkan keinginan-keinginan rakyat itu, apakah itu melalui para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, para akademisi dan sebagainya kan itu masih mendengarkan semua,” sambung Mardiono.

Mardiono menambahkan, dalam Pilpres 2024, pihaknya akan juga memakai polarisasi yang sama dengan sikap PDIP pada 2014, yakni dengan mendengarkan aspirasi rakyat dalam rangka mengusung siapakah sosok cawapres yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo.

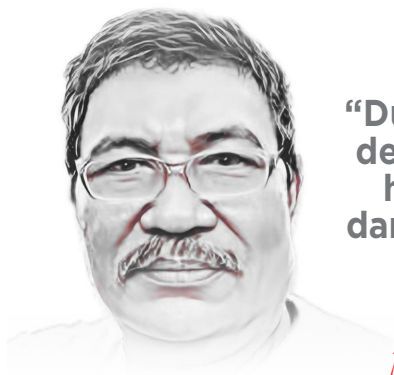
“Jadi, kita semua akan menjawab dari apa yang telah diinginkan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh bahwa di dalam demokrasi itu tidaklah mutlak kalau nanti menang 100 persen ya namanya tidak demokrasi,” jelas Mardiono.

“Jadi demokrasi itu didasarkan pada kompetisi kita bukan bersaing tapi kita saling bersanding. Nah, itulah karakter Indonesia. Jadi di Indonesia tidak ada ‘oh kita bersaing kemudian seperti tinju saja, tinju saja. Ya itu persaingan begitu ketat tapi tetap akan

bersahaja apalagi adalah untuk kepentingan bangsa dan negara,” tandas Mardiono. ●RDO







“Dukungan dari Nasdem terhadap Anies harus tambah kuat dan tetap konsisten”

**Muslim Arbi**

# NASDEM TAK BERTAJI ANIES DITINGGAL PERGI

**Kemampuan Partai Nasdem dipertanyakan dalam memenangkan Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, elektabilitas bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang juga diisi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, tercatat melorot dalam hasil survei sejumlah lembaga.**

**S**elama sebulan terakhir, ada 24 lembaga survei yang melakukan jajak pendapat secara langsung kepada publik dan mengajukan 3 pilihan nama bakal capres potensial di tahun politik 2024, termasuk Anies Baswedan.

Anies diadu kuat tingkat keterpilihannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bernaung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Selain itu, nama bakal capres yang diusung PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Perindo, Ganjar Pranowo, juga masuk tiga teratas bersama Anies dan Prabowo dalam banyak hasil survei.

Namun, hasilnya mencatat elektabilitas Anies berada di posisi paling buncit dibanding dua nama bakal capres lainnya. Sebagai contoh, dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia, Anies mendapat elektabilitas sebesar 23,9 persen, di bawah Ganjar yang mendapat 35,2 persen dan Prabowo 33,2 persen.

Bahkan, dalam hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, elektabilitas Anies di bawah 20 persen pada Juli, atau hanya sebesar 18,4 persen. Sementara, Ganjar berada di atas Anies dengan elektabilitas sebesar 35,3 persen. Prabowo tercatat paling tinggi karena angkanya mencapai 38,2 persen.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim

Arbi, memandang, merosotnya elektabilitas Anies tidak bisa dipungkiri karena pengaruh Partai Nasdem yang tidak kuat dalam percaturan politik saat ini. Terlebih partai politik berlogo burung elang itu juga dia nilai tidak maksimal mendukung pencapresan Anies.

“Dukungan dari Nasdem terhadap Anies harus tambah kuat dan tetap konsisten. Jangan sampai karena berbagai faktor di antaranya karena tekanan, karena faktor keuangan, atau didekati oleh PDIP,” ujar Arbi kepada Info Indonesia, Jumat, 25 Agustus 2023.

Dia mengamati, faktor paling dominan yang membuat Partai Nasdem belum bertaji dalam pencapresan Anies hingga hari ini adalah tersangkutnya Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Gerald Plate, yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo.

“Karena tekanan terhadap capres Anies akan terus dilakukan, dan sebaliknya dukungan terhadap lawan Anies terlihat didukung. Prabowo didukung Jokowi, demikian Ganjar oleh PDIP dan Megawati. Memang tekanan terhadap Nasdem dengan tersangka dan Kejaksaan menahan Jhonny G Plate, Sekjen-nya Nasdem pasti berpengaruh,” ungkapnya.

Melihat fakta tersebut, Arbi mempertanyakan kekuatan politik Surya Paloh yang hampir beberapa bulan ke belakang tidak in-

tens menunjukkan batang hidungnya di percaturan politik jelang Pilpres 2024. Alih-alih, hanya menonton dari jauh gegap gempita pertarungan politik koalisi pendukung Prabowo dan Ganjar yang tengah berseteru meraup dukungan elite politik dan juga parpol.

Arbi juga memandang Partai Nasdem dan Surya Paloh tengah diuji konsistensinya mendukung Anies. Karena baru-baru ini, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mewacanakan perkawinan politik PDIP dengan Nasdem, yaitu memasang Anies dengan Ganjar sebagai cawapres.

Apakah karena itu Surya Paloh yang sudah banyak makan asam garam perpolitikan akan menyerah? Karena sikap Surya Paloh dan Nasdem akan berpengaruh jika membuang Anies atau memposisikan sebagai cawapres seperti bujuk rayu Said Abdullah-PDIP.

Dari sisi internal Koalisi Perubahan, Arbi meyakini ada

ketidakkompakan yang terjadi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS dalam proses pengusungan Anies di Pilpres 2024. Menurutnya, stagnasi yang terjadi di KPP sangat terasa, karena disinyalir Partai Nasdem tengah mempengaruhi Anies menentukan cawapres yang akan mendampingi di kontestasi.

“Bisa saja jika kursi cawapres ini tidak segera dirumuskan antara Nasdem dan Demokrat dan PKS, dipastikan akan terjadi perpecahan internal KPP. Padahal seharusnya soal cawapres sudah di serahkan ke Anies Baswedan sebagai capres yang telah disepakati,” tuturnya.

Namun, Arbi memandang masalah internal KPP lebih ditengarai adanya ketegangan politik antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sebabnya, Surya Paloh bersama-sama dengan anak buahnya mewacanakan sejumlah nama cawapres yang dianggap cocok mendampingi Anies seperti Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; hingga yang terbaru putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid.

Sementara, Partai Demokrat menyuarakan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies. Bahkan, belakangan banyak petugas parpol berlambang Mercy itu mende-sak Anies dan Nasdem untuk segera menetapkan putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024.

“Karena berharap cawapresnya adalah AHY, dan sampai sekarang belum ada sinyal segera diumumkan oleh Anies, Demokrat terlihat goyah, potensi berubah sikap terhadap capres Anies. Tetapi Demokrat akan rugi. Tapi di sini terlihat, masing-masing anggota koalisi mesti membuang ego masing-masing. Dan jangan ada lagi saling berpecah. Karena tekanan oleh penguasa yang sudah punya capres untuk lemahkan capres KPP sudah sedemikian kerasnya. Jangan lagi saling tekan di internal,” tandas Arbi.

•RDO





**“Ada kenaikan tren pada Ganjar dari Mei 2021 yang cuma 5,9 persen sekarang 22,7 persen”**

**Deni Irvani**



# PKB SIAP MERAPAT ELEKTABILITAS GANJAR IKUT MELEJIT

**Elektabilitas calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, kian melejit. Uniknya, lonjakan elektabilitas Ganjar tidak berselang lama setelah PKB menyatakan kesiapannya merapat jika dipastikan mendapat kursi calon wakil presiden.**

**H**al itu dapat dilihat dari survei yang dirilis SMRC untuk periode 31 Juli hingga 11 Agustus 2023. Survei tersebut dilakukan ke 4.260 responden yang dipilih secara random dengan metode tatap muka serta margin of error 1,65 persen.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, mengatakan, dukungan spontan kepada Ganjar mencapai 22,7 persen. Angka itu jadi yang tertinggi dibanding capres lain, seperti Prabowo Subianto di angka 20,8 persen dan Anies Baswedan 12,0 persen.

Di bawah itu, ada nama lain yang meraih dukungan sangat kecil atau tidak sampai satu persen. Kemudian, masih ada sekitar 36 persen pemilih yang belum bisa memilih capres pilihan mereka secara spontan.

“Ada kenaikan tren pada Ganjar dari Mei 2021 yang cuma 5,9 persen sekarang 22,7 persen,” kata Deni di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.

Meski begitu, kenaikan tren turut dialami Prabowo dari 13 persen menjadi 20,8 persen dan Anies dari 5,9 persen menjadi 12 persen. Sedangkan, nama Joko Widodo trennya mulai menurun dari 27,6 persen dan saat ini tinggal 6,8 persen.

Deni membenarkan, raihan dukungan ke Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memang sangat ketat dalam tiga survei terakhir atau Mei sampai Agustus 2023. Ganjar sempat menguat sampai 24,6 persen pada akhir April 2023.

Tepatnya, setelah PDIP secara resmi mendeklarasikannya sebagai capres. Lalu, sempat melemah ke 19,2 persen, 18,6 persen dan kembali menguat pada Agustus 2023 dan men-

dapat dukungan spontan sampai 22,7 persen.

“Jadi, dalam satu bulan terakhir ada kenaikan sekitar empat persen,” ujar Deni.

Kondisi yang berbeda dialami Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Prabowo stagnan dari raihan 20,9 persen ke 20,8 persen, sedangkan Anies stagnan dari raihan 12,7 persen menjadi 12 persen.

SMRC juga merilis hasil survei elektabilitas terbaru dalam simulasi tertutup tiga nama, di mana Ganjar Pranowo unggul dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dengan 35,9 persen.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan, hasil survei ini didapat dari pertanyaan kepada responden tentang siapa presiden yang akan dipilih jika pilpres berlangsung sekarang.

“Ganjar mendapat dukungan 35,9 persen, sementara Prabowo 33,6 persen dan Anies 20,4 persen dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 10,1 persen,” kata Saiful.

Menurut Saiful, dalam dua tahun terakhir, dari Mei 2021 ke Agustus 2023, dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5 persen menjadi 35,9 persen. Sementara Prabowo stagnan dari 34,1 persen menjadi 33,6 persen. Anies cenderung turun dari 23,5 persen menjadi 20,4 persen.

Dalam simulasi ini, SMRC juga menanyakan kepada responden tentang seberapa kemungkinan mengubah pilihan tersebut.

Jawaban dari pertanyaan ini k e m u d i a n

dikelompokkan sebagai pemilih kuat yang kecil kemungkinan mengubah pilihan.

Dari ketiga nama, proporsi pemilih kuat pada Ganjar tercatat paling tinggi yakni sebesar 69 persen. Lalu, Prabowo mengekor di belakangnya dengan 67 persen dan Anies 64 persen.

Hasil serupa juga tercatat dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas untuk periode 27 Juli-7 Agustus 2023. Litbang Kompas mewawancarai 1.364 responden di 38 provinsi.

Tingkat elektabilitas Ganjar menyalip Prabowo. Sementara, elektabilitas Anies Baswedan semakin tertinggal jauh dari kedua pesaingnya tersebut.

Dalam simulasi terbuka, elektabilitas Ganjar berada di angka 24,9 persen. Gubernur Jawa Tengah tersebut unggul tipis atas Prabowo Subianto yang mengantongi elektabilitas sebesar 24,6 persen. Sementara Anies Baswedan berada di angka 12,7 persen.

Tingkat elektabilitas Ganjar itu naik dibanding Mei 2023 yang hanya 22,8 persen. Saat itu, Ganjar tertinggal 1,7 persen dari Prabowo. Sementara elektabilitas Prabowo disebut mengalami kemandekan karena hanya naik 0,1 persen. Posisi keterpilihan Ganjar saat ini mendekati elektabilitas Januari 2023 yang sebesar 25,3 persen.

Persaingan ketat antara Ganjar dan Prabowo juga terlihat dalam simulasi 10 nama. Ganjar disebut mendapatkan elektabilitas sebesar 29,6 persen, sementara Prabowo 27,1 persen. Anies, meskipun naik dari simulasi terbuka, hanya mengantongi 15,2 persen.

J a r a k  
a n t a r a  
G a n j a r  
d a n

Prabowo semakin terbuka dalam simulasi empat nama. Ganjar kembali unggul dengan perolehan 31,8 persen sementara Prabowo 27,8 persen. Anies tetap di urutan bontot dengan 15,6 persen.

Dalam simulasi tiga nama, Ganjar mendapatkan elektabilitas 34,1 persen, Prabowo sebesar 31,3 persen dan Anies sebesar 19,2 persen.

SMRC juga melakukan simulasi efek popularitas head to head pada bakal capres pilihan, yakni antara Ganjar dan Prabowo. SMRC menyebut apabila pengenalan terhadap kedua bakal calon berimbang, maka Ganjar unggul atas Prabowo. Ganjar mendapatkan perolehan 46,3 persen, sedangkan Prabowo 42,5 persen.

Selain itu, Saiful mengungkapkan, apabila tingkat popularitas ketiga bakal calon berimbang dalam simulasi, Ganjar tetap unggul atas Prabowo dan Anies Baswedan. Ganjar memperoleh 38,8 persen, Prabowo 31,6 persen, sementara Anies 21,7 persen.

Saiful juga menyatakan dalam temuan surveinya, pengetahuan terhadap Ganjar meningkatkan elektabilitasnya secara signifikan terhadap Prabowo.

Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan elektabilitas Ganjar unggul di Pulau Jawa. “Wilayah Pulau Jawa cenderung masih dikuasai Ganjar dengan dukungan saat ini 39,6 persen suara pada skema tiga calon, sementara Prabowo 28,8 persen dan Anies 16,7 persen,” tulis Litbang Kompas edisi Senin, 21 Agustus 2023.

Berdasarkan survei, Ganjar tercatat menguasai Jawa Tengah dengan persentase paling tinggi, yakni mencapai 62 persen.

Dia juga tercatat unggul di Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Prabowo menguasai Jawa Barat dan Banten, sedangkan Anies yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta unggul di ibu kota.

Jika Ganjar menguasai Pulau Jawa, elektabilitas Prabowo cenderung unggul di luar Jawa. Untuk luar Jawa cenderung dikuasai Prabowo dengan persentase 34,7 persen, sementara Ganjar 27 persen dan Anies 22,3 persen. Suara Prabowo di luar Jawa cenderung naik dari sebelumnya 29,3 persen.

Di luar Jawa, Prabowo tercatat unggul di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Elektabilitas Prabowo mendapat posisi tertinggi di sejumlah provinsi, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua Selatan, dan Nusa Tenggara.

Sementara, Ganjar mendapat suara signifikan di Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Papua Barat Daya, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Tengah. Adapun, Anies memiliki basis suara yang kuat di Aceh, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Pegunungan. ●RDO

